

Sejarah Terbentuknya Provinsi Kepulauan **Bangka Belitung**



Nuraini

Sejarah Terbentuknya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Editor : Suarman

959.8108
NUP
S

Diterbitkan oleh :
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional
Tanjungpinang
2007

Sejarah Terbentuknya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

**Penulis
Nuraini**

**Editor
Suarman**

**Tata Letak
M.Hidayatullah**

Diterbitkan oleh :
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional
Tanjungpinang
2007

ISBN: 978-979-1281-13-3

SAMBUTAN DIREKTUR NILAI SEJARAH

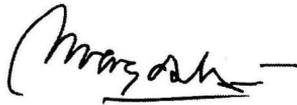
Otonomi daerah adalah bentuk baru sistem pemerintahan yang dihasilkan oleh orde reformasi, dan tentu saja peluncurannya disertai dengan begitu banyak harapan dari para pembuat keputusan (*decision maker*). Tidak hanya itu, masyarakat sebagai komponen terbesar yang menyusun struktur bertajuk Bangsa Indonesia ini menunggu dengan harap-harap cemas, akankah sistem baru memberikan peluang yang lebih besar kepada masyarakat untuk mendekati gerbang kesejahteraan atau justru sebaliknya.

Tidak ada pilihan lain, dalam era otonomi daerah dibutuhkan peran masyarakat yang lebih besar karena sistem pemerintahan akan secara nyata atau langsung berhubungan dengan masyarakat, tanpa perantara pihak ketiga. Jika selama penerapan sistem sentralisasi, pemerintah pusat lebih banyak mengambil jarak dengan masyarakat, maka dengan sistem desentralisasi saat ini praktis keterlibatan masyarakat akan semakin nyata dan tampaknya mutlak dibutuhkan.

Peluang ini segera diambil oleh segenap komponen masyarakat Kepulauan Bangka Belitung, dengan memperjuangkan terbentuknya sebuah provinsi sendiri yang terlepas dari Sumatera Selatan sebagai provinsi induk di daratan Sumatera. Perjuangan membentuk suatu pemerintahan sendiri ini sebenarnya telah cukup lama dilakukan oleh segenap komponen masyarakat Kepulauan Bangka Belitung, perjuangan tersebut telah dimulai sejak tahun 1950an. Namun, baru pada tanggal 21 November 2000 keinginan itu terwujud dengan terbentuknya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diresmikan sebagai Provinsi ke-31 di Indonesia. Dari judul yang diberikan: **Sejarah Terbentuknya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**, Saudara Nuraini ingin mengangkat sejarah pembentukan dan romantika terbentuknya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam suatu kajian sejarah. Paling tidak tulisan ini akan memberikan gambaran kepada kita semua bahwa perjuangan untuk membentuk suatu pemerintahan sendiri yang lepas dari dominasi pemerintahan induk sangat berliku dan penuh dengan pengorbanan dalam arti yang luas.

Sudah selayaknya jika hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh tenaga peneliti di Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional dipublikasikan kepada khalayak luas, agar masyarakat mengetahui apa yang menjadi isi penelitian tersebut. Selain itu, juga untuk mendorong minat masyarakat dalam memahami sejarah dan budaya nusantara yang amat beragam. Sehubungan dengan itu, saya menyambut baik terbitnya buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, September 2007
Direktur Nilai Sejarah



DR. Magdalia Alfian
NIP. 131 408 289

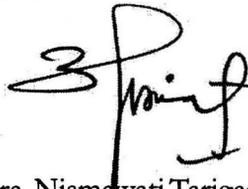
KATA PENGANTAR

Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Tanjungpinang adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Direktorat Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film Departemen Kebudayaan dan Pariwisata yang salah satu tugasnya adalah melakukan penelitian sejarah dan budaya di wilayah kerjanya yang meliputi empat provinsi yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Riau, Jambi dan Bangka Belitung. Kegiatan penelitian tersebut dilakukan dalam rangka pengumpulan dan penginventarisasian informasi yang diperlukan untuk merumuskan kebijakan kebudayaan, maupun bagi kepentingan masyarakat pada umumnya.

Sehubungan dengan itu Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Tanjungpinang untuk tahun anggaran 2007 menerbitkan 5 (lima) judul hasil penelitian yang telah dilakukan para peneliti di Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Tanjungpinang dalam kurun waktu tahun 2000-2006, yang meliputi aspek kesejarahan maupun kebudayaan. Hal ini sesuai dengan komitmen Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Tanjungpinang untuk menerbitkan hasil penelitian dan kajian yang dilakukan para peneliti, meskipun dalam jumlah yang terbatas.

Dengan terbitnya buku ini, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan. Semoga buku-buku yang diterbitkan berguna bagi bangsa dan negara yang kita cintai.

Kepala
Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai
Tradisional Tanjungpinang



Dra. Nismawati Tarigan
NIP.131 913 840

DAFTAR ISI

SAMBUTAN DIREKTUR NILAI SEJARAH.....	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Tujuan dan Sasaran	2
1.3 Ruang Lingkup	2
1.4 Keluaran	3
1.5 Persyaratan Teknis	3
BAB II LINTASAN SEJARAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	4
2.1 Toponim Kepulauan Bangka Belitung	4
2.2 Perkembangan Sosial Politik	7
BAB III PROFIL DAERAH SEBELUM TERBENTUKNYA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	12
3.1 Kota Pangkalpinang	13
3.2 Kabupaten Bangka Induk	16
3.3 Kabupaten Bangka Tengah	17
3.4 Kabupaten Bangka Selatan	17
3.5 Kabupaten Bangka Barat	18
3.6 Kabupaten Belitung Barat	20
3.7 Kabupaten Belitung Timur	20
BAB IV TERBENTUKNYA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	22
4.1 Beberapa Bentuk Perjuangan	22
BAB V PENUTUP	78
5.1. Kesimpulan	78
5.2. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
DAFTAR INFORMASI.....	82
BIOGRAFI PENULIS.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan Provinsi yang ke-31 di Indonesia yang terbentuk pada tanggal 9 Februari 2001. Kelahiran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berdasarkan Undang-undang Nomor 27 tahun 2000 tersebut merupakan jawaban dan hasilnya perjuangan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung yang telah lama menginginkan berdirinya sebuah Provinsi, terlepas dari Provinsi Sumatera Selatan. Sebelumnya, daerah ini hanyalah berstatus Kabupaten dengan beberapa Kecamatan.

Pada tahun 1816 Kepulauan Bangka Belitung dikuasai oleh Belanda, dan merupakan tahun awal Keresidenan yang ada di Bangka Belitung. Selanjutnya, pemerintahan Belanda membentuk Dewan Bangka Sementara (Voolopige Bangka Raad) pada tahun 1946, dan kemudian pada tahun 1948 bergabung dengan Dewan Riau dan Dewan Belitung dalam satu Federasi Bangka Belitung Riau (Babiri).

Tahun 1950, Negera Federal dibubarkan dan Bangka Belitung kembali ke NKRI. Kemudian Bangka Belitung diserahkan kepada Gubernur Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung pada waktu itu telah menjadi Kabupaten dengan 5 Kewedanaan dan 13 Kecamatan di bawah Provinsi Sumatera Selatan berikut dengan Keresidenan Lampung, Bengkulu dan Jambi yang tertuang dalam Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1956. LN 1956/tln 1091 (Dikbud, 2004: 4).

Pada tahun 1956, Keresidenan Bangka Belitung dihapuskan dan dimasukkan oleh Pemerintah ke dalam Provinsi Sumatera Selatan bersama 14 Kabupaten lainnya di Sumatera bagian selatan, maka sejak itulah timbul semangat dan aspirasi masyarakat Bangka Belitung memperjuangkan pembentukan Provinsi Bangka Belitung. Akan tetapi perjuangan masyarakat Bangka Belitung untuk membentuk Provinsi sendiri terlepas dari Provinsi Sumatera Selatan pada waktu itu tidak berjalan lancar, karena Riau kurang memberi respon. Selain itu, perjuangan untuk membentuk Provinsi Bangka Belitung kurang memasyarakat dan hanya dimotori oleh elit politik saja. Oleh karena itu, perjuangan untuk membentuk Provinsi sendiri pada waktu itu dapat dikatakan gagal. Meskipun perjuangan masyarakat Bangka Belitung belum berhasil, tetapi mereka tetap terus berjuang, sehingga keinginan masyarakat Bangka Belitung untuk menjadi Provinsi sendiri akhirnya tercapai

juga. Pada tahun 2000 dikeluarkanlah Undang-Undang No. 27, tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian pada tanggal 9 Februari 2001 Provinsi Bangka Belitung diresmikan, dan Kota Pangkalpinang ditetapkan sebagai ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan uraian diatas yang menjadi masalah dalam penulisan ini adalah mengapa masyarakat Riau kurang mendukung untuk terbentuknya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan, usaha-usaha apa saja yang dilakukan masyarakat Bangka Belitung untuk mencapai keinginannya menjadi Provinsi sendiri. Semua itu perlu mendapat jawaban dalam penelitian ini.

1.2 Tujuan dan Sasaran

1.2.1 Tujuan

Kegiatan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsi seluruh latar belakang dan proses pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta usaha-usaha yang telah dilakukan segenap komponen masyarakat Kepulauan Bangka Belitung untuk mewujudkan terbentuknya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan pemekaran dari Provinsi Sumatera Selatan yang beribukotakan Palembang.

Selanjutnya, data dan informasi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dapat dijadikan bahan masukan bagi warga yang membutuhkannya.

1.2.2 Sasaran

Sasaran penelitian ini adalah dalam waktu dekat diharapkan dapat memberi tambahan informasi pada sejarah nasional Indonesia yang terus mengalami revisi. Dan, secara khusus terhadap sejarah lokal daerah Kepulauan Bangka Belitung, menumbuhkan semangat persatuan kepada generasi sekarang dan yang akan datang, sehingga diharapkan tulisan ini dapat memberi sumbangan terhadap muatan local bidang studi sejarah daerah Kepulauan Bangka Belitung, yang akhirnya dapat memberikan manfaat kepada dunia pendidikan di daerah ini.

1.3 Ruang Lingkup

Penelitian ini dibagi ke dalam dua ruang lingkup yaitu ruang lingkup spasial dan temporal. Ruang lingkup spasial meliputi seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan ruang lingkup temporalnya adalah tahun 1956 (setelah Keresidenan Bangka Belitung dihapuskan) hingga sekarang.

2 Sejarah Terbentuknya Bangka Belitung

1.4 Keluaran

Pada akhirnya penelitian ini diharapkan menghasilkan sebuah naskah penelitian yang kiranya bermanfaat bagi berbagai kalangan, terutama masyarakat umum yang mencintai sejarah. Dan, tentu saja dunia pendidikan khususnya untuk kalangan pelajar dan mahasiswa yang menaruh perhatian terhadap perkembangan daerahnya, dan memberikan sumbangan terhadap penulisan sejarah lokal daerah Kepulauan Bangka Belitung di masa yang akan datang.

1.5 Persyaratan Teknis

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah kritis . Selanjutnya untuk menghasilkan prolehan dan menyeluruh, maka pendekatan yang digunakan; pertama penelitian kepustakaan sebagai kegiatan pengumpulan data dan pencatatan data serta fakta. Kedua, penelitian lapangan dan wawancara terhadap nara sumber yang memiliki kompetensi tentang masalah yang diteliti sebagai upaya pengumpulan dan melengkapi data dan fakta yang ada, disamping untuk menguji data dan fakta yang belum ditemukan sebelumnya. Dan, ketiga interpretasi terhadap data dan fakta serta dilanjutkan dengan penulisan laporan.

BAB II BANGKA BELITUNG SELAYANG PANDANG

2.1 Toponim Kepulauan Bangka Belitung

Bangka dan Belitung adalah dua pulau terpisah, namun menyatu secara kultural yang kemudian dikenal dengan sebutan Bangka Belitung. Adapun mengenai toponimi Pulau Bangka dan Belitung ada beberapa pendapat yakni:

2.1.1 Bangka

Menurut salah seorang pelaut bernama Jans Huyghens Van Linschoteen dalam bukunya *Reys Geschrift Van de Navegation Portugaleyysers in Orienten* yang artinya perjalanan navigasi orang Portugis di dunia Timur. Dan, pada tahun 1595 telah beredar secara meluas di Amsterdam bahwa ada sebuah pulau bernama “**Banca**”. Tetapi di dalam peta yang ditemukan pada abad ke-17 tidak tertera nama Banca, tetapi tertera nama Chinapata. Dalam sebuah majalah terbitan tahun 1846 *Tijdschrift Vour Nederlandsch Indie* Letkol Lange menegaskan bahwa yang disebut dengan Banka atau Banca adalah Pulau yang sama dengan Chinapata atau China – Batto (Sujitno, 1996: 35).

Pulau Bangka tidak hanya terbatas pada pulau Bangka yang dikenal pada saat ini saja, akan tetapi juga didalamnya termasuk kawasan Sumatera Selatan yang kemudian dikenal dengan Palembang. Pada waktu itu Bangka disebut dengan nama Bangka Palembang. Kemudian nama ini meluas ke arah barat dengan nama yang lengkap Bangka Hulu. Lewat lidah orang barat menyebut Bangka Hulu menjadi Bengkulu. Begitu pula penduduk setempat (asli) dengan jelas menyebut wilayahnya dengan nama Bengkulu. Akan tetapi, di dalam jurnal-jurnal abad 20 termaktub pulau ini ditulis dengan menggunakan ejaan “**Banka**”. Kemudian ketika seorang ahli pertambangan bernama Cornelis de Groot mengusulkan agar penulisan pulau itu dengan ejaan “**Bangka**”. Dan, ejaan tersebut berlaku sampai sekarang, walaupun dalam tulisan balok timah tetap menggunakan ejaan Banka. Nama Banka pernah menimbulkan sikap pro dan kontra, ketika orang mengaitkan nama Banka dengan Vanka. Meskipun kedua kata ini berbeda ejaanya, tetapi mempunyai arti yang sama yaitu timah. Kata Banka berasal dari “**Vanca**” yang berasal dari bahasa Sansekerta yang. Bahasa Sangsekerta telah jauh berkembang pada abad ke-7/8, dimana ketika itu perkembangan bahasa pada masa kerajaan Sriwijaya. Hal ini memperkuat dugaan bahwa sebenarnya tambang timah di Pulau Bangka telah lama ditemukan jauh dimasa yang lampau, yaitu ketika wilayah tersebut masih dibawah pengaruh Hindu, atau

kata lain dimasa kejayaan Sriwijaya.

Selanjutnya, nama Bangka menurut penuturan orang Muntok berasal dari sebuah kapal. Pada zaman dahulu belayar sebuah kapal besar dari negeri Johor. Dalam perjalanan kapal tersebut terkena amukan badai, sehingga kandas. Kapal yang kandas itu kemudian menjadi pulau Bangka. Selanjutnya, dikisahkan ada sebuah perahu penyelamat hanyut kearah timur kemudian kandas dan menjadi pulau Belitung. Sedangkan menurut orang Belinyu, menyatakan bahwa asal usul nama pulau Bangka dan Belitung berasal dari seorang anak Raja Bugis bernama Seri Gading. Karena Seri Gading berbuat serong kepada adik kandungnya, maka ia diusir oleh ayahnya yaitu Raja Tumpu Awang. Dan, dia boleh kembali apabila sudah mendapatkan seorang isteri yang baik. Dengan menggunakan sebuah kapal yang terbuat dari kayu Bangka, maka Seri Gading pun belayarlal. Sebelum sampai ke tempat tujuan, Seri Gading berhenti di Johor. Di negeri inilah Seri Gading menemukan jodohnya, seorang puteri yang berasal dari keturunan Cina. Karena Seri Gading merasakan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh orang tuanya, maka ia kembali ke negeri asalnya.

Dalam perjalanan pulang, kapal yang membawa Seri Gading dan isterinya dihantam badai, sehingga kapal tersebut terdampar di sebuah pulau. Di pulau tersebut Seri Gading dan isterinya berserta beberapa awak kapalnya menemukan sebuah pondok. Di bawah serumpun bambu yang tumbuh di halaman pondok itu, diketemukan dua sosok mayat (bangkai) yang sudah membusuk. Oleh karena itulah, mereka memberi nama pulau itu dengan sebutan pulau Bangkai. Kemudian, sebutan bangkai berubah menjadi bangka. Menurut cerita yang berkembang, mayat yang ditemukan itu adalah mayat seorang laki-laki dan seorang perempuan, mereka adalah anak Raja Pelembang yang diusir oleh orang tuanya karena telah berbuat serong. Akan tetapi, ada pula yang menyatakan bahwa bangkai yang ditemukan di pulau itu karena adanya pertempuran yang sangat seru.

Jika benar nama Bangka itu berasal dari bangkai, maka dapat dihubungkan dengan keadaan dan kondisi alam setempat, dimana letak Bangka dibatasi oleh sebuah Selat Gaspar yang sangat berbahaya. Disebut dengan selat Gaspar dikarenakan pada waktu itu ada seorang pelaut berasal dari Inggris bernama Gaspar mati tenggelam. Oleh karena itu, selat tersebut diberi nama selat Gaspar. Apabila dihubungkan dengan kondisi alam yang gersang dan ganasnya selat Gaspar, maka sering dijumpai bangkai nelayan atau pelaut yang terdampar dan mati kelaparan. Tetapi ada pula maksud kata bangkai tadi mempunyai konotasi sebagai bangkai kapal yang

kandas atau pecah oleh banyaknya karang di sekitar Pulau Bangka. Oleh karena itu, memungkinkan nama Bangka berasal dari “waka” atau “wangkang” yaitu sebutan sebuah kapal laut yang sangat umum pada waktu itu.

Pendapat lain, mengatakan bahwa Pulau Bangka berasal dari sejenis kayu bernama kayu bangka yang digunakan untuk membuat kapal yang akan membawa Seri Gading yang telah diusir oleh orang tuanya. Kapal yang membawa Seri Gading kemudian pecah di hantam badai, dan kayu-kayunya menjelma menjadi pulau Bangka.

2.1.2 Belitung

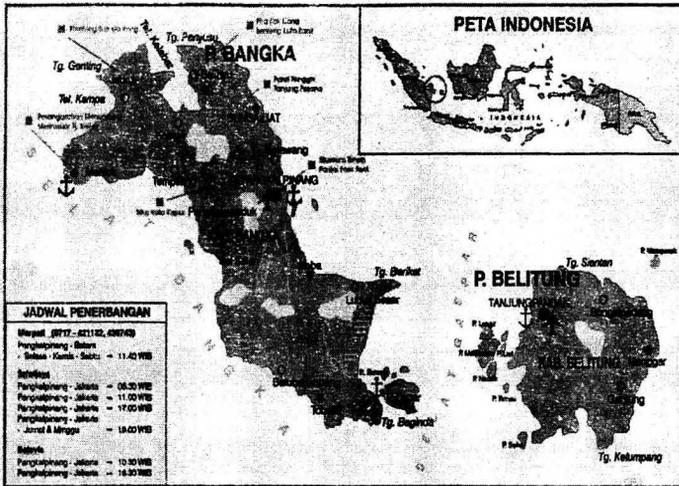
Belitung dalam prasasti Jawa Kuno yang berangka tahun 899 (820 – 821 Caka) menyebut Maha Raja Rakai Watakara Dyah Balitung. Diperkirakan Maha Raja Rakai Watakara Dyah adalah nama seorang raja yang berkedudukan di Watacaraka pada tepian sungai Bogowonto atau Kendiri, karena pada tahun tersebut diperkirakan di Belitung sudah berdiri sebuah kerajaan kecil, tetapi tidak mempunyai kedudukan yang kuat. Untuk mendukung keberadaannya, maka mengakui adanya Dinasti Sanjaya yang ketika itu sedang berkuasa di Jawa. Akan tetapi, dasar tersebut tidaklah terlalu kuat seperti sandaran pulau Bangka dalam perkembangannya seiring dengan Sriwijaya, yang sebagai dasarnya adalah prasasti Kota Kapur pada tepian pantai Barat Bangka.

Meskipun anggapan tersebut tidak terlalu kuat, tetapi nama Belitung cukup dikenal secara luas, karena dalam syair Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca nama Belitung disebut-sebut berulang kali sebagai penghormatan terhadap Raja Hayam Wuruk.

Selanjutnya, dalam sejarah kuno Belitung menyebutkan bahwa pada abad ke- 15 di Belitung berdiri sebuah kerajaan bernama “Badau”, berpusat di Pelulusan. Rajanya bernama Datuk Mayang Geresik, yang diperkirakan berasal dari daerah Bawean (sebuah kawasan yang berada di daerah pantai utara Jawa, berhampiran dengan Pulau Madura). Kerajaan tersebut diakui sebagai kerajaan pertama di Belitung. Masyarakat dikenal sebagai pelaut dan perantau. Hal ini didasarkan dari beberapa peninggalan yang ditemukan berupa senjata, tombak, keris, gong, kelintang dan garu Rasul.

Kemudian, berdasarkan cerita rakyat atau legenda menyebutkan bahwa dahulu Pulau Belitung menjadi satu dengan Pulau Bali. Tetapi karena kehendak Dewa, pulau tersebut terbelah menjadi dua (Bali – potong). Melalui proses metamorfosis Bali-potong berubah menjadi “Balitong”. Kemudian, melalui proses itu pula, Balitong berubah lagi menjadi “Belitung”. Dan, sampai saat ini nama Belitung masih tetap diabadikan. Tetapi, sumber-

sumber Cina menyebut Pulau Belitung adalah Kole atau Kau-lan.



Peta Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2.2 Perkembangan Sosial-Politik

2.2.1 Sosial

Kepulauan Bangka Belitung yang wilayahnya meliputi Kabupaten Bangka Induk, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung Barat, Kabupaten Belitung Timur, dan Kota Pangkalpinang ternyata sebagai tempat pemukiman komunitas-komunitas Melayu. Sejak dahulu mereka selalu menyebut dirinya sebagai Melayu Kepulauan Bangka Belitung. Oleh karena itu, kehidupan sosial yang berlangsung di daerah ini, saat ini telah menyatu sebagai masyarakat Kepulauan Bangka Belitung.

Kilas balik terhadap perjalanan sejarah suku bangsa, dapat diketahui bahwa penduduk asli Kepulauan Bangka Belitung ini pada mulanya adalah suku laut yang berasal dari keturunan Melayu tua (Proto Melayu). Akan tetapi sejak kedatangan keturunan Melayu muda (Deutro Melayu), orang-orang Proto Melayu lebih memilih untuk menyingkir, karena mereka enggan berbaur dengan orang-orang Deutro Melayu. Ada yang memilih ke daerah pedalaman dan ada pula yang memilih meninggalkan pulau-pulau dan hidup dengan cara mengembara di lautan. Semenjak itu, daerah Kepulauan Bangka Belitung

menjadi tempat kehidupan orang-orang dari kelompok Deutro Melayu, dimana pada perkembangan selanjutnya lebih dikenal sebagai suku bangsa Melayu. Mereka ini pulalah yang pada gilirannya dianggap sebagai penduduk asli.

Salah satu ciri dari orang Melayu Kepulauan, terutama di masa lampau adalah pola kehidupannya yang berorientasi pada kelautan. Pola kehidupan yang demikian ini pada gilirannya mendorong mereka untuk memilih pantai atau sungai-sungai besar sebagai tempat pemukiman. Maka muncul komuniti-komuniti orang Melayu itu senang tinggal di tepi pantai atau sungai yang mudah dilayari atau disinggahi. Pada perkembangan selanjutnya, daerah-daerah sebagai tempat komuniti hidup dan berkehidupan, dengan mudah pula menjadi pusat-pusat perdagangan dan pelayaran. Posisi mereka yang demikian itentukan membuat komuniti-komuniti ini menjadi kelompok terdepan dalam hubungan dengan dunia luar. Itu sebabnya, orang-orang Melayu di kawasan ini sebagai kelompok yang lebih awal mengenal agama Islam. Tidak heran pula bila ajaran-ajaran Islam itu begitu meresap dalam tradisi yang berlaku dan menyelimuti berbagai upacara dan tindakan-tindakan simbolik. Kenyataannya ini pulalah yang membuat orang Melayu selalu diidentikan dengan Islam.

Islam merupakan agama yang terbuka bagi semua orang, bahkan mengajarkan bahwa setiap orang muslim itu bersaudara, terlepas dari suku bangsa mana orang tersebut berasal. Sifat keterbukaan dan pengaruh ajaran ini disadari atau tidak telah membentuk sikap masyarakat Melayu dan kebudayaannya, sehingga ikut menjadi longgar dan terbuka.

Keterbukaan struktur masyarakat Melayu dan kebudayaannya sangat memungkinkan untuk mengakomodasi perubahan-perubahan kebudayaan dan penyerapan unsur-unsur kebudayaan yang berbeda-beda, sepanjang perubahan dan penyerapan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam, adapt istiadat dan sopan santun Melayu. Itu pula sebabnya orang Melayu di Kepulauan Bangka Belitung ini cenderung dapat menerima kehadiran orang-orang lain yang bukan Melayu untuk hidup bersama dan membaur dalam suatu komunitas, baik dalam konteks pemukiman, kampung, rukun warga, maupun dalam konteks bertetangga atau bersebelahan rumah, bahkan banyak pula yang sudah merambah dalam bentuk hubungan yang lebih dekat lagi yaitu ikatan perkawinan.

Dukungan berbagai kondisi di atas menyebabkan Kepulauan Bangka Belitung saat ini tidak lagi menjadi tempat hunian orang-orang Melayu semata, melainkan pula telah menjadi tempat hunian berbagai suku bangsa pendatang seperti; WNI keturunan Cina, Bugis, Flores, Buton, Jawa, Minangkabau, Batak

dan lain-lainnya.

Di dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Kepulauan Bangka Belitung yang majemuk itu tidak hanya berhubungan dan bergaul dengan anggota kelompok etniknya masing-masing, melainkan juga berhubungan dan bergaul dengan anggota kelompok etnik lainnya. Untuk itu memang diperlukan suatu bentuk tata cara bergaul yang dapat berlaku umum dan diterima oleh semua pihak. Bila tidak ada tata cara yang dapat berlaku umum, maka hubungan yang berlangsung tidak akan dapat berjalan lancar bahkan sangat membuka peluang untuk terjadinya benturan-benturan sosial di antara mereka.

Wujud sistem pergaulan yang juga menjadi model dalam hubungan antar suku bangsa di daerah Kepulauan Bangka Belitung adalah dalam hal terjadinya perkawinan campuran, misalnya perkawinan campuran antara orang Melayu dengan orang Minangkabau, maka pada saat berlangsungnya pesta perkawinan. Kedua belah pihak seringkali dapat menerima apabila penganti menggunakan adaptat arias yang berbeda. Pesta perkawinan biasanya berlangsung di rumah pengantin perempuan, apabila pengantin perempuan berasal dari etnik Melayu, maka pada sesi pertama kedua mempelai akan di rias dengan adat Melayu. Dan, pada sesi berikutnya barulah pengantin dirias dengan adat Minangkabau. Pesta perkawinan dengan model seperti di atas sudah banyak diikuti oleh warga masyarakat di daerah ini. Walaupun demikian, rasanya masih terlalu dini hal itu dianggap sebagai bentuk system pergaulan yang sudah bersifat umum dan lokal.

Masyarakat Kepulauan Bangka Belitung memang majemuk, namun kemajemukan itu tidak menghalangi pergaulan di antara mereka, bahkan hubungan sosial yang terjalin lebih menunjukkan pada suasana yang kondusif.

2.2.2 Politik

Lebih dari seratus tahun Kepulauan Bangka Belitung dikepalai oleh Residen, secara administratif dan teknis operasional berada dibawah pemerintahan pusat di Batavia (Jakarta). Kemudian atas dasar ordonansi tanggal 2 Desember 1933 (Stbl No. 565), maka terbentuklah "Residentie Banka en Ouderhoregheden" yang terhitung dari tanggal 11 Maret 1933, dan menetapkan Beliton (Belitung) menjadi salah satu " Onderafdeling" yang dikepalai oleh seorang Controleur dengan pangkat Asisten Residen dari Keresidenan Bangka, berikut pulau-pulau lain sekitarnya. Dan, pulau Bangka sendiri terbagi dalam 5 Onderafdeling, yang masing-masing dikepalai oleh seorang Controleur. Lima Onderafdeling kemudian menjadi kewedanaan

residen Bangka yang terakhir menjelang perang dunia kedua adalah P. Brouwer.

Ketika kekuasaan kolonial Belanda atas Kepulauan Indonesia direbut oleh Nippon pada tahun 1942, semasa berkobarnya perang Asia Timur Raya, Keresidenan Bangka Belitung diperintah oleh pemerintah Militer yang dinamakan "*Bangka Biliton Gunseibu*". Pemerintah Administratif menurut sistem pemerintahan Belanda diteruskan dengan mengganti nama/istilah saja yaitu dengan istilah-istilah Jepang atau Indonesia. Seperti Residence menjadi Chokan, dan Controleur menjadi Sidokan. Namun disamping petugas-petugas Jepang diangkat pembantu-pembantu bangsa Indonesia seperti Gunco dan Fuku Gunco.

Pada waktu Nippon sudah terdesak di dalam peperangan melawan sekutu, barulah di Bangka diadakan semacam DPRD, yang dinamakan Bangka Syu Sangikai yang diketuai oleh Masyarif Datuk Bendaharo Lelo. Setelah Jepang ditaklukan oleh Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, kemudian diikuti dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Atas inisiatif tokoh-tokoh masyarakat, maka dibentuklah Pemerintah Otonomi Sumatera Selatan dibawah pimpinan Gubernur Militer, dan Pulau Bangka termasuk didalamnya dimana pimpinan pemerintahan dipegang oleh Masyarif Datuk Bendaharo Lelo bekas ketua Bangka Syu Sangikai dengan gelar Residen yang dibantu oleh seorang Asisten Residen dan seorang Kontrolir yang diperbantukan.

Let. Gouveneur General Nederlandsch Indie mempergunakan kekuasaannya menjadi daerah otonom dengan membentuk Dewan Bangka Sementara (Voollopige Bangka Raad) dengan surat keputusannya tanggal 10 Desember 1946 nomor 8 (Staatsblad 1946 nomor 38). Dewan Bangka sementara ini merupakan Lembaga Pemerintah tertinggi dalam bidang otonomi, dibuka dengan resmi pada tanggal 10 Pebruari 1947, dengan ketua diangkat Masyarif Datuk Bendaharo Lelo. Sedangkan anggota-anggotanya terdiri dari 16 orang. Sepuluh bulan kemudian "Dewan Bangka Sementara" ditetapkan menjadi "Dewan Bangka" yang tidak bersifat sementara lagi, dengan surat keputusan Lt.GG. Ned. Indie tanggal 12 Juli 1947 Nomor 7 (Staatsblad 1947 Nomor 123). Dilantik tanggal 11 Nopember 1947, dengan ketua dan anggota-anggota Dewan Bangka Sementara itu juga. Setelah Masyarif meninggal, diangkatlah Saleh Ahmad, Sekretaris dari Dewan tersebut sebagai ketua.

Dalam bulan Januari 1948 Dewan Bangka bergabung dengan Dewan Riau dan Dewan Belitung dalam suatu federasi Bangka Belitung, Riau

(BABERI) yang disahkan oleh Lt.GG.Ned. Indie dengan surat keputusan tanggal 23 Januari 1948 nomor 4 (Stbl. 1948 Nomor 123), yang kemudian disahkan menjadi salah satu Negara Bagian dalam pemerintahan Federal RIS. Hal ini ternyata tidak berlangsung lama, dengan keputusan Presiden RIS No. 141 tahun 1950, Negara Bagian ini disatukan kembali dalam Negara RI, sehingga belaku UU Nomor 22 Tahun 1948 dalam wilayah ini.

Pada tanggal 21 April 1950, datanglah Perdana Menteri Dr. Halim beserta rombongan yang terdiri 18 orang ke Bangka, diantaranya Dr. Mohd. Isa Gubernur Sumatera Selatan. Pada tanggal 22 April bertempat di Keresidenan diserahkanlah pemerintahan atas Bangka kepada Gubernur Sumatera Selatan. Dengan demikian bubarlah Dewan Bangka dan pemerintahan setempat dipimpin oleh R. Soemardjo yang ditetapkan Pemerintah RI sebagai Residen Bangka Belitung dengan kedudukan di Pangkalpinang.

BAB III

PROFIL DAERAH SEBELUM TERBENTUKNYA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka Induk, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Barat, dan Kabupaten Belitung Timur dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 16.423,54 km². Luas daratan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 11.534,142 km² yang terdiri dari luas daratan Kabupaten Bangka 6.644,42 km² ditambah dengan wilayah Pangkalpinang 89,4 km² dan luas daratan Pulau Belitung 4.800,60 km². Sedangkan

luas kawasan perairan adalah 65.301 km² atau 79,9 % dari luas keseluruhan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Foto. 1 Alam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menunjukkan perkembangan yang pesat, khususnya di bidang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk yang pada tahun 1998 berjumlah 880.248 jiwa. Pada tahun 1999 meningkat menjadi 940.700 jiwa (sumber: BPS. Prop. Sumsel 1998). Dan, diperkirakan pada tahun-tahun berikut jumlah penduduk lebih meningkat lagi. Hal ini mengakibatkan bertambahnya tugas volume kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peningkatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam

rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Melihat perkembangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang begitu pesat, maka perlu dimekarkan dengan membentuk beberapa Kabupaten/kota yaitu Kabupaten Bangka Induk, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Barat, Kabupaten Belitung Timur dan Kota Pangkalpinang.

3.1 Kota Pangkalpinang

Kota Pangkalpinang merupakan salah satu daerah otonom yang terletak di bagian timur Pulau Bangka dengan luas wilayahnya 89,40 km². Kota Pangkalpinang berada pada garis 106^o4 - 106^o7 Bujur timur dan garis 2^o4 – 2^o4 lintang selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Selindung Lama Kecamatan Pangkalan
- Baru Kabupaten Bangka Tengah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Dul
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan, dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Air Duren Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka.

Kota Pangkalpinang wilayahnya adalah bergelombang dan berbukit dengan ketinggian 20 -50 m di atas permukaan laut, dan memiliki kemiringan daerah antara 0-24 %. Secara morfologi daerahnya berbentuk cekung dan pada bagian pusat kota berada di daerah yang rendah.

Pembentukan Kota Pangkalpinang adalah berdasarkan Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1956 tanggal 14 Nopember 1956. Pada waktu itu Kota Pangkalpinang hanya memiliki luas 31,7 km² dengan penduduk berjumlah sekitar 50.000 orang. Sebagai pejabat Walikota pertama adalah Raden Supardi Suwarjo. Urusan-urusan yang termasuk wewenang Kota Pangkalpinang pada waktu itu adalah Pekerjaan Umum, Kesehatan, Kehewan, Perikanan Darat, Sosial, Perindustrian Kecil, Agraria, Perburuhan, Penerangan, Pertanian, Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Selanjutnya, Walikota Pangkalpinang diganti oleh Ahmad Basirun tahun 1956, Raden Abdullah tahun 1956-1958, Hundani tahun 1958-1960. Hundani merupakan Walikota pertama yang dipilih oleh DPRD Kotapraja Pangkalpinang hasil Pemilu tahun 1955, M. Saleh Zainuddin tahun 1960-196,

Rustam Effendi (1967 -1972), H. Masdan, SH selaku Care Taker, Roesli Romli (1972-1978), dan H. Mohammad Arub, SH beliau menjabat dua priode tahun 1978-1983, dan tahun 1983-1988.

Pada masa H.Mohammad Arub,SH wilayah Kota Madya Dati II Pangkalpinang diperluas dari 31,70 km² menjadi 89,4 km². Wilayah pemerintahan juga di data ulang, dari 2 Kecamatan menjadi 4 Kecamatan, 55 Kelurahan dan 3 Desa yakni: Kecamatan Pangkal Balam dengan 13 Kelurahan, Kecamatan Taman Sari dengan 21 Kelurahan ditambah 1 desa dari perluasan wilayah, yakni Desa Tua Tunu, Kecamatan Rangkui dengan 13 Kelurahan dan Kecamatan Bukit Intan dengan 8 Kelurahan dan 2 Desa yakni Desa Bacang dan Desa Air Itam.



Foto. 2 Sungai besar yang terdapat di Kecamatan Rangkui, berfungsi sebagai saluran utama pembuangan air hujan dan sebagai prasarana transportasi

Dalam perkembangannya, Kota Pangkalpinang selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan dimana pada waktu itu meliputi 55 Kelurahan dan 3 Desa, maka menjadi 35 Kelurahan. Sedangkan dengan

Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kecamatan yang sebelumnya terdiri dari 5 Kecamatan, kemudian dikembangkan menjadi 6 Kecamatan yaitu: Kecamatan Pangkalbalam, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Gerunggung, Kecamatan Rangkui, Kecamatan Pangkalan Baru dan Kecamatan Bukit Intan.

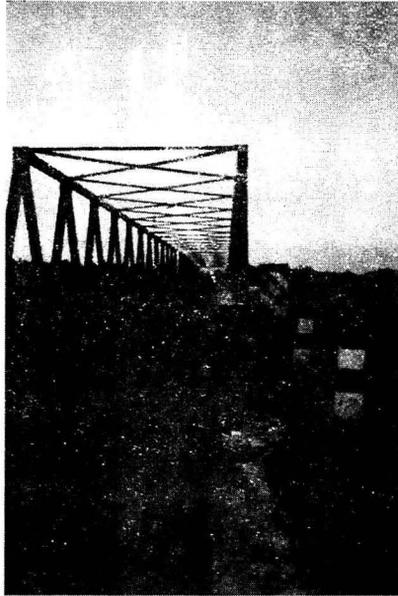


Foto. 3 Jembatan Pahlawan 12, jembatan penghubung antara Kecamatan Gerunggung dan Kecamatan Rangkui

H. Mohammad Arub, SH pada tahun 1988 diganti oleh H. Rosman Djohan tahun 1988-1993. Kemudian diganti oleh Drs. H. Soffyan Rebuin, MM yang menjabat selama 2 priode 1993-1998 dan tahun 1998-2003. Drs. H. Sofyan Rebuin, MM, selanjutnya diganti oleh Drs. H. Zulkarnain Karim, MM yang terpilih pada tanggal 4 Agustus 2003 berpasangan dengan Triatmadja, BSc sebagai Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang. Sebelum menjadi Walikota Pangkalpinang Drs. H, Zulkarnain Karim, MM adalah Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang dan Wakil Walikota Pangkalpinang Triatmadja, BSc adalah anggota DPRD Kota Pangkalpinang dari PDIP. Kedua pasangan ini dilantik pada tanggal 26 Agustus 2003, dan masih menjabat hingga

sekarang.

Kota Pangkalpinang adalah salah satu kota yang sangat dinamis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang banyak menyimpan kekayaan alam yang belum dilelola sepenuhnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Kota Pangkalpinang telah ditetapkan sebagai ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh pemerintah sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2001 tanggal 9 Februari 2001.

3.2 Kabupaten Bangka Induk

Kabupaten Bangka Induk dibentuk berdasarkan Undang-undang darurat Nomor 4,5 dan 6 tahun 1956, dengan 13 wilayah Kecamatan, dan 5 wilayah Kewedanaan yaitu Pangkalpinang, Sungailiat, Belinyu, Mentok, dan Toboali.

Ibukota Kabupaten Bangka Induk pada awalnya masih menumpang dalam wilayah Kotapraja Pangkalpinang, dan sebagai Bupati pertama ditunjuk R. Soekarta Martaatmadja. Kemudian pada tahun 1971 dikeluarkanlah peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1971 tanggal 19 Pebruari 1971, yang menetapkan Kota Sungailiat sebagai ibukota Kabupaten Bangka Induk yang terdiri dari 8 Kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Sungai Liat
2. Kecamatan Belinyu
3. Kecamatan Riau Silip
4. Kecamatan Bakam
5. Kecamatan Pemali
6. Kecamatan Merawang
7. Kecamatan Mendo Barat, dan
8. Kecamatan Puding Besar.

Luas wilayah Kabupaten Bangka Induk sekitar 2.950,68 km² atau 295.068 ha, dengan batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dan Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Natuna
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bangka Barat, Selat Bangka di Teluk Kelabat.

Saat ini jabatan Bupati diemban oleh Ir. Eko Maulana Ali, MSc dan wakil Bupati Yusroni Yazid, B.Sc yang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia.

Kabupaten Bangka Induk mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat dan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat. Disamping itu, ada juga dinas-dinas Kabupaten dan Lembaga eknis Kabuapten.

Salah satu Pendapatan Asli Daerah Kabuapten Bangka Induk yang cukup besar adalah sector pertambangan (bijih timah, batu granit, pasir kwarsa, dan kolian), perikanan, dan perkebunan lada putih yang merupakan salah satu komoditi andalan masyarakat Kabupaten Bangka Induk. Disamping itu, pendapat dari sektor lainnya yaitu sektor pariwisata. Ada 8 tapak kawasan wisata dengan luas 1.969.125 Ha yang siap untuk dikembangkan.

3.3 Kabupaten Bangka Tengah

Kabupaten Bangka Tengah dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2003. Kabupaten Bangka Tengah terdiri dari 4 Kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Pangkalan Baru
2. Kecamatan Sungai Selan
3. Kecamatan Simpang Katis, dan
4. Kecamatan Koba.

Ibukota Kabupaten Bangka Tengah adalah Koba yang terletak di Kecamatan Koba. Pemerintah di Kabupaten Bangka Tengah dipimpin oleh seorang Bupati dan wakil Bupati yang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia. Sebagai daerah otonom pemerintahan Kabupaten Bangka Tengah mempunyai kewenangan daerah, mencakup seluruh bidang pemerintahan termasuk kewenangan wajib yang terdiri atas Pekerjaan Umum, Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan, Pertanian, dan lain-lain.

Setelah menjadi daerah otonom sendiri sejak tahun 2003, Kabupaten Bangka tengah perlahan-lahan terus membangun daerahnya. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka Tengah yang cukup memberi kontribusi terhadap pembangunan daerahnya adalah tambang timah, lada putih dan hasil laut. Apabila dikelola dengan baik akan dapat meningkatkan kemakmuran rakyatnya.

3.4 Kabupaten Bangka Selatan

Kabupaten Bangka Selatan adalah salah satu Kabupaten dari tujuh Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terletak di sebelah selatan Pulau Bangka. Ibukota Kabupaten Bangka Selatan adalah Toboali terletak di Kecamatan Toboali. Kabupaten Bangka Selatan

dibentuk bersamaan dengan tiga Kabupaten lainnya yaitu: Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, dan Kabupaten Belitung Timur berdasarkan Undang-undang Nomor 05 Tahun 2003.

Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 5 Kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Simpang Rimba
2. Kecamatan Toboali
3. Kecamatan Air Gegas
4. Kecamatan Payung, dan
5. Kecamatan Lepar Pongok.

Kabupaten Bangka Selatan sebagian besar dikelilingi oleh laut. Kabupaten ini memiliki potensi di bidang perikanan dan pariwisata yang sangat besar.

3.5 Kabupaten Bangka Barat

Pembentukan Kabupaten Bangka Barat adalah berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2003. Kabupaten Bangka Barat terletak di ujung sebelah barat laut Pulau Bangka, dengan wilayah sebagian besar dikelilingi oleh pesisir pantai. Secara administratif pemerintahannya memiliki 5 Kecamatan yaitu;

1. Kecamatan Muntok,
2. Kecamatan Simpang Teritip,
3. Kecamatan Jebus,
4. Kecamatan Kelapa, dan
5. Kecamatan Tempulang yang terbagi menjadi 54 desa dan 3 kelurahan.

Batas-batas wilayah Kabupaten Bangka Barat adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Natuna,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Kelabat, Kecamatan Bakam, Kecamatan
- Puding Besar, dan Kecamatan Mendo Barat,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Bangka,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Bangka.

Ibukota Kabupaten Bangka Barat adalah Muntok yang terletak di Kecamatan Muntok. Pemerintahan di Kabupaten Bangka Barat di pimpin oleh seorang Bupati dan wakil Bupati. Saat ini jabatan Bupati di emban oleh H. Syaiful Rahman. Pejabat Bupati Bangka Barat untuk pertama kali diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden RI berdasarkan usul Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Sebagai daerah Otonom Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

mempunyai kewenangan daerah, mencakup seluruh bidang pemerinthan, termasuk kewenangan wajib yang terdiri atas pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan, pertanian, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup dan lain-lain.

Salah satu pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangka Barat yang cukup besar adalah sektor Pariwisata, disamping pendapatan dari sektor lainnya yang cukup besar seperti Pertambangan (bijih timah), dan perikanan.

Kabupaten Bangka Barat adalah salah satu primadona Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di masa depan, karena daerah ini banyak dan layak dikembangkan setara dengan daerah lain yang memiliki sumber pendapatan dari sektor jasa Pariwisata, khususnya wisata bahari.

Selain wisata bahari/pantai Kabupaten Bangka Barat juga memiliki wisata Sejarah, wisata Budaya, wisata Agro, Sarana Olah Raga dan Kerajinan Tangan.

a. Wisata Sejarah

Lokasi wisata sejarah berada di Kecamatan Muntok dan Kecamatan Jebus seperti:

- Tempat pengasingan Ir. Soerarno, Bung Hatta, H. Agus Salim dan kawan-kawan,
- Batu besar berbentuk kapal yang lebih di kenal dengan Batu Balai (berlatar belakang kisah tentang seorang anak yang durhaka kepada ibunya),
- Rumah Mayor, gedung bersejarah dan merupakan salah satu gedung kuno yang ada di kota Muntok,
- Makam keramat Bukit Jebus,
- Kelenteng Kong Fuk Miao (merupakan salah satu tempat peribadatan etnis Cina).

b. Wisata Budaya

Lokasi wisata budaya berada di Kecamatan Tampuling, Jebus, Kelapa dan Simpang Teritip. Wisata budaya berupa:

- Upacara Perang Ketupat,
- Upacara adat buang jong,
- Upacara adat Ceriak Neong,
- Upacara adat sedekah gunung,
- Upacara adat sedekah laut,
- Upacara adat sedekah kampung,
- Berbalas pantun,

- Barongsai,
- Sembahyang Rebut (Chinese Culture),
- Cap Go Meh (Chenese Culture).

c. Wisata Agro

Berada di lokasi Kecamatan Kelapa dan Simpar Teritip yakni kebun lada putih dan kebun kelapa sawit.

d. Olah Raga

Berada di lokasi Pantai Tanjung Kalian, Pantai Berakit Kecamatan Muntok. Jenis olah raga air, antara lain; Selayar dan Jet – Sky.

e. Kerajinan Tangan

Berada di lokasi Kecamatan Muntok dan Kelapa. Jenis nya yaitu; Pewter, akar bahari dan kopiah resam.

3.6 Kabupaten Belitung Barat

Kabupaten Belitung Barat merupakan salah satu Kabupaten yang termasuk dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan luas wialayahnya 2.293,69 km². Kabupaten ini terletak di belahan bumi selatan dengan posisi 107 o 35 -108 o 8 Bujur Timur dan 2 o 30 – 30 15 Lintang Selatan.

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Belitung Barat adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Gaspar
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Karimata.

Kabupaten Belitung Barat terdiri dari 5 Kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Tanjungpandan,
2. Kecamatan Membalong,
3. Kecamatan Badau,
4. Kecamatan Sijuk, dan
5. Kecamatan Selat Nasik.

Ibukota Kabupaten Belitung Barat adalah Tanjungpandan yang terletak di Kecamatan Tanjungpandan. Kabupaten Belitung Barat sebagian besar wilayahnya dikelilingi oleh lautan dan tanahnya banyak mengandung timah, kaolin, kursa serta bahan mineral lainnya. Tanahnya yang subur dapat digunakan untuk pertanian seperti Kelapa sawit, karet dan berbagai macam tanaman lainnya.

3.7 Kabupaten Belitung Timur

Kabupaten Belitung Timur dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2003. Wilayah Kabupaten Belitung sebelumnya merupakan wilayah kerja pembantu Bupati Belitung Barat. Wilayah Kabupaten Belitung Timur terdiri dari 8 Kecamatan yaitu;

1. Kecamatan Tanjungpandan,
2. Kecamatan Sijuk,
3. Kecamatan Selat Nasi,
4. Kecamatan Membalong,
5. Kecamatan Dendang,
6. Kecamatan Gantung,
7. Kecamatan Kelapa Kampit,
8. Kecamatan Manggar.

Ibukota Kabupaten Belitung Timur adalah Manggar, yang terletak di Kecamatan Manggar. Pemerintahan di Kabupaten Belitung Timur dipimpin oleh seorang Bupati dan wakil Bupati. Pejabat Bupati Belitung Timur untuk pertama kali diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia.

Sebagai daerah otonom pemerintah Kabuapten Belitung Timur mempunyai kewenangan daerah, mencakup seluruh bidang pemerintahan termasuk kewenangan wajib yang terdiri atas pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan dan koperasi.

Kabupaten Belitung Timur wilayahnya sebagian besar dikelilingi oleh pesisir pantai. Kabupaten ini memiliki potensi besar di bidang kelautan, perikanan dan pariwisata, terutama wisata pantai dan bahari.

BAB IV

TERBENTUKNYA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Perjuangan rakyat Bangka Belitung untuk membentuk Provinsi sendiri, terlepas dari Provinsi Sumatera Selatan di mulai pada tahun 1956 tatkala Keresidenan Bangka Belitung dihapus dan dimasukan oleh Pemerintah ke dalam Provinsi Sumatera Selatan bersama dengan 14 Kabupaten lainnya di Sumatera bagian selatan berdasarkan Undang-undang Darurat No. 4 Tahun 1956. Sejak itulah timbul semangat dan aspirasi masyarakat Bangka Belitung untuk memperjuangkan pembentukan Provinsi Bangka Belitung. Akan tetapi, perjuangan masyarakat Bangka Belitung untuk membentuk Provinsi sendiri pada waktu itu belum berhasil, karena perjuangan pada era ini kurang memasyarakat dan hanya dimotori oleh elit politik lokal saja.

Perjuang rakyat Bangka Belitung untuk menjadi Provinsi sendiri tetap terus menyala. Pada tahun 1964 perjuangan dilanjutkan lagi dengan menggalang semua kekuatan masyarakat Bangka Belitung, dan membentuk suatu panitia perjuangan dan organisasi yang dibentuk di Pangkalpinang. Beberapa pertemuan di gedung DPRD Bangka berlangsung sangat dinamis. Dan, dengan tegas mencetuskan perlunya segera daerah Bangka Belitung menjadi Provinsi.

4.1 Beberapa Bentuk Perjuangan

4.1.1 Membentuk Panitia

Tahun 1966-1970, perjuangan untuk membentuk Provinsi sendiri dilanjutkan lagi dan lebih teroganisir dengan dilembagakan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong (DPRD - GR) oleh ketiga daerah pada saat itu yaitu; DPRD – GR Kotamadya Pangkalpinang, Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung. Pada tanggal 28 Maret 1966 DPRD – GR Kabupaten Bangka membentuk panitia persiapan Provinsi Bangka Belitung melalui SK. NO. 2/KP/DPRD-GR/1966, yang berisi agar segera dibentuk sebuah Badan Penyelenggaraan Pembentukan Panitia Persiapan Propinsi Bangka Belitung dengan membentuk komisi khusus dengan Personalia, Ny. Zoebaedah Roesli BA, Pd (Ketua DPRD –GR Kabupaten Bangka), dan Anggota DPRD - GR Kabupaten Bangka, Lamsuedin Glr, Datuk Bandaro Sati, Zulkifli AM.A.Z.Fahmie, M.Zen Madji, serta Tjen Hong Liong.

Setelah di Kabupaten Bangka terbentuk Panitia Persiapan Provinsi Bangka Belitung, kemudian menyusul DPRD - GR Kotamadya Pangkalpinang

dengan membentuk sebuah Panitia Sponsor Persiapan Provinsi Bangka Belitung dengan SK. No. 6/DPRD GR/1967. Melalui Surat Keputusan tanggal 21 Januari 1967 ini, ditetapkan pula susunan personalia dengan Ketua Zulkarnain Achmad, Ketua I Lettu Saimin Sagiman, Ketua II Soewardi Soerjohadojo, Ketua III Bernadus Bernadi, BA Ketua IV Irawadi Umar, baru bicara 1 Bakri 11 Usman, Jurubicara II Achjar Ibrahim, jurubicara III Achmad Isja, Sekretaris 1 Badri Umarbaki, Sekretaris 11 Sjamsul Komar, Perengkapan Letda 11 M Jasids Rachman, dan Bendahara Badri Umarbaki.

Kemudian melalui SK No. 5/DPRD GR/1967 tanggal 30 Maret 1967 DPRD GR Kabupaten Belitung mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Panitia Researh DPRD GR Kabupaten Belitung dengan ini:

1. Mengesahkan Laporan Panitia Researh DPRD-GR Kabupaten Belitung yang dibentuk dengan Surat Keputusan Ketua DPRD-GR No./DPRD-GR/1967.
2. Menyetujui peningkjatan Ex Keresidenan Banga Belitung menjadi Provinsi Bangka Belitung.
3. Supaya dibentuk Panitia Persiapan Provinsi dan panitia kecil lain yang dirasa perlu yang pelaksanaan pembentukannya diserahkan kepada DPRD-GR Kabupaten Belitung dengan mendengar Panitia Musyawarah sesuai dengan pasal 14 Peraturan Tata Tertib DPRD-GR Kabupaten Belitung.

Selain dukungan formal dari lembaga legislatif dari tiga daerah, perjuangan pada tahun 1966-1970 juga mendapat dukungan dari elemen masyarakat yang ada pada saat itu seperti:

1. Keputusan rapat lurah beserta wakilnya satu ke Asistenan (Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung pada tanggal 11 Maret 1967 di Kantor ke Asistenan Tanjungpandan dengan suara bulat (aklamasi) menyetujui serta menyokong gagasan Kabupaten Bangka dan Belitung ditingkatkan menjadi Provinsi Bangka Belitung.
2. Front Pancasila Kabupaten Belitung melalui Surat No. 05/FP/Kab.Bel/1967 tanggal 13 Maret 1967 di Manggar 1967, menyatakan dukungan terhadap gagasan peningkatan Ex. Keresidenan Bangka Belitung menjadi daerah Provinsi Bangka Belitung.
3. Pada tanggal 13 Maret 1967 di Manggar, Pimpinan Cabang Psil Belitung memberi tanggapan mengenai gagasan peningkan Ex Keresidenan Bangka Belitung menjadi daerah Provinsi Bangka Belitung.

4. Sementara itu, Markas Cabang Legiun Veteran, Republik Indonesia Tanjungpandan Belitung melalui Surat No. 17/Srk/67 tanggal 13 Maret 1967 menyatakan.
 - a. Pada prinsipnya dapat menyambut gagasan peningkatan Ex. Keresidenan Bangka Belitung menjadi Provinsi.
 - b. Bahwa gagasan peningkatan tersebut di atas adalah merupakan gagasan yang wajar sebagai salah satu usaha perbaikan dan atau untuk pembangunan.
5. Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI) Cabang Belitung melalui Surat No. 01/KASI/1967 menyatakan:
 - a. Bahwa gagasan peningkatan Ex. Keresidenan Bangka Belitung menjadi Provinsi Bangka Belitung adalah sebagai suatu usaha untuk melepaskan diri dari kemacetan-kemacetan terutama di bidang Administrasi Pemerintahan antara Belitung Palembang serta Pembiayaan Daerah.
 - b. Bahwa gagasan peningkatan tersebut diatas adalah merupakan gagasan yang wajar sebagai salah satu usaha perbaikan dan atau untuk Pembangunan Daerah Belitung.
6. Partai Kristen Cabang Belitung Tanjungpandan melalui Surat No. 01/DPT/KKD/BEL/1967 menyatakan:
 - Pada prinsipnya Pantai Kristen Cabang Belitung Tanjungpandan tidak berkeberatan dengan maksud menjadikan Bangka Belitung satu daerah Tingkat I dengan Ibu Kota Provinsi di Pangkalpinang (BNGK).

Tindak lanjut dari SK No. 2/KP/DPRD-GR/1996, DPRD-GR Kabupaten Bangka tanggal 26 Juni 1967 memutuskan:

1. Dengan suara bulat dalam Sidang Panipura ke-II Tahun 1967 DPRD-GR Kabupaten Bangka tanggal 26 Juni 1967 menyatakan kehendak rakyat dan memutuskan kepada Pemerintah Pusat c.q Menteri Dalam Negeri agar supaya daerah Ex. Keresidenan yang terdiri dari daerah Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung dan Kotamadya Pangkalpinang dalam waktu yang sesingkatnya Belitung dan Kotamadya Pangkalpinang dalam waktu yang sesingkatnya di regrouping menjadi daerah Provinsi.
2. Dengan suara bulat dalam sidang Paripura ke-II tahun 1967 DPRD-GR Kabupaten Bangka tanggal 26 Juni 1967 berkehendak menyelenggarakan dan melaksanakan dalam rangka kerjasama dengan ketiga daerah dalam daerah Ex. Keresidenan Bangka Belitung

dalam suatu Panitia Gabungan.

3. Menugaskan kepada Panitia Persiapan Provinsi Bangka Belitung DPRD-GR Kabupaten Bangka untuk mengusahakan Pembentukan Panitia Gabungan tersebut.

Kemudian menyusul DPRD-GR Kotamadya Pangkalpinang pada tanggal 12 September 1967 melalui Surat No. 16/SK/GR/1967 memutuskan:

1. Menuntut kepada Pemerintah Pusat c.q Menteri Dalam Negeri, agar daerah Ex Keresidenan Bangka Belitung yang terdiri dari Kotamadya Pangkalpinang, Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung, sesuai dengan keinginan serta hasrat rakyatnya, dalam waktu yang sesingkat mungkin ditingkatkan menjadi daerah Provinsi.
2. Menghendaki adanya kerja sama yang erat dan kompak antara daerah Kotamadya Pangkalpinang, Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung dalam rangka menyelesaikan persiapan-persiapan yang diperlukan untuk tersukseskan terbentuknya daerah Provinsi Bangka Belitung.
3. Menugaskan kepada Panitia Sponsor Persiapan Provinsi Bangka Belitung untuk: Melaksanakan pengumpulan bahan-bahan persyaratan formil dan materiil sebagai dasar daripada peningkatan daerah Ex. Keresidenan Bangka Belitung yang terdiri dari daerah Kotamadia Pangkalpinang, Kabupaten Belitung menjadi satu daerah Provinsi.

Namun panitia-panitia yang dibentuk oleh tiga DPRD-GR dan dukungan dari elemen masyarakat ini terkesan berjalan sendiri-sendiri selama satu tahun. Dan, karena kurang terkoordinasi dan tidak efektif, maka perjuangan di era ini kurang membuahkan hasil seperti yang diharapkan.

Menyadari kelemahan ini, maka tiga DPRD-GR mengubah cara kerja dan menyalurkan visi dan misinya melalui berbagai pertemuan untuk menghilangkan segala rintangan dan kendala yang menjadi penyebab tidak atau kurang lancarnya perjuangan pembentukan Provinsi Bangka Belitung. Oleh karena itu, maka pada tanggal 14 Oktober 1967 melalui Surat No. I/SK/GAB/PROF/1967 Panitia Gabungan Persiapan Provinsi Bangka dan Belitung DPRD-GR Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung dan Kotamadya Pangkalpinang memutuskan:

- Menunjuk Ketua Panitia Persiapan dan Perjuangan Provinsi Bangka dan Belitung DPRD-GR Kabupaten Belitung, sebagai Ketua Periodik Pertama dari Panitia Gabungan Persiapan Provinsi Bangka dan Belitung DPRD-GR Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung

dan Kotamadya Pangkalpinang, dengan tugas mengkoordinir Panitia-panitia tersebut.

Selanjutnya, pada tanggal 29 September 1968 Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, Kotamadya Pangkalpinang menyatakan Ikrar bersama yang dikenal dengan “**Ikrar Tanjung Kelayang**”. Adapun isi ikrar tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwasanya hakekatnya suatu perjuangan bersama adalah semata-mata demi untuk kepentingan bersama.
2. Adalah benar adanya bahan landasan musyawarah yang dijiwai oleh rasa persaudaraan diantara kita ketiga daerah akan selalu menjadi metode di dalam setiap pemecahan masalah yang sekarang dan nanti akan dihadapi.
3. Adalah benar adanya bahwa landasan keadilan, dan kebenaran yang dijiwai oleh rasa taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa akan menjadi tujuan akhir dari setiap keputusan, yang sekarang dan nanti akan diambil.
4. Bahwa dengan terbentuknya Provinsi bagi ketiga daerah hendaknya akan dapat diharapkan adanya pembagian nilai-nilai yang wajar, benar dan adil bagi ketiga daerah.
5. Bahwa dengan terbentuknya Provinsi bagi ketiga daerah, hendaknya dapatlah diharapkan peningkatan efisiensi Administrasi Pemerintah dan Pembangunan Darah, materiil dan spiritual.

Kemudian, pada tanggal 29 September 1968 di Tanjungpandan muncul Agreement Bersama Antar Utusan Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, Kotamadya Pangkalpinang dengan memutuskan:

- Menyetujui bersama untuk membawa persyaratan yang diajukan oleh utusan Kabupten Belitung di dalam nota kepada Panitia yang lebih tinggi tingkatnya.

Agreement Bersama Antar Utusan Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, Kotamadya Pangkalpinang dalam usaha mencapai realisasi Proivinsi Bangka Belitung pada tanggal 29 September 1968 di Tanjungpandan juga memutuskan:

1. Membentuk Presidium sebagai tindakan penyempurnaan Panitia Persiapan dalam rangka pengikatan perjuangan untuk teralisasinya Provinsi Bangka Belitung.
2. Organisasi Presedium tersebut pertama terdiri dari:
 - a. Ketua Presedium berkedudukan di Jakarta, atas tunjukan Kabupaten Bangka

- b. Seorang anggota dari Jakarta atas tunjukkan Belitung
 - c. Seorang anggota Kotamadya Pangkalpinang atas tunjukkan Kabupaten Bangka
 - d. Seorang anggota dari Kabupaten Bangka atas tunjukkan Kabupaten Bangka
 - e. Seorang anggota dari Kabupaten Bangka atas tunjukkan Kabupaten Belitung.
3. Ketua Presidium dibantu oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di Jakarta (tunjukkan Kotamadya Pangkalpinang) dan seorang Bendahara yang berkedudukan di Bangka.
 4. Di tiap daerah, anggota Presidium membawahi lima seksi yang terdiri dari:
 - a. Seksi penelitian bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan dan Geografis
 - b. Seksi penelitian bidang Sosial dan Politik
 - c. Seksi penelitian bidang Sejarah Kebudayaan dan Sejarah Administrasi Pemerintahan
 - d. Seksi Keuangan
 - e. Seksi Hubungan Masyarakat
 5. Persoalan prinsipil harus diambil dalam suatu sidang lengkap Presidium.
 6. Meminta kesediaan Bupati/Walikota/Kepala Daerah dan unsur Muspida serta Pimpinan DPRD-GR ketiga daerah untuk bertindak selaku pelindung dan penasihat Presidium
 7. Menunjuk Formatuurschap yang terdiri dari:
 - a. Jahja Jacob dari Kabupaten Belitung
 - b. Drs, Rusli Rachman dari Kabupaten Bangka
 - c. Sjamsuri Djalil dari Kotamadya Pangkalpinang
 8. Tugas Formatur seperti tersebut ketujuh surat keputusan ini adalah:
 - a. Melengkapi personalia Presidium dan pembantu Presidium tersebut pada kedua dan ketiga surat keputusan ini
 - b. Menyusun peraturan rumah tangga Presidium dengan ketentuan tugas-tugas ini harus sudah selesai selambat-lambatnya pada tanggal 1 Nopember 1968.
 9. Panitia Sponsor/Panitia dari daerah Bangka dan Belitung mengakhiri tugasnya pada saat pelantikan anggota Presidium

4.1.2 Membentuk Presidium

Untuk mencapai terbentuknya Provinsi Bangka Belitung, Agreement Bersama Antar Utusan Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, Kotamadya Pangkalpinang yang kedua di Pangkalpinang pada tanggal 28 Januari 1969 memutuskan segera membentuk Presidium yang terdiri dari ketiga daerah, dan segera segera membentuk perwakilan di luar ketiga yang dianggap perlu oleh Presidium.

Anggota Presidium sebanyak lima orang terdiri dari; dua orang dari Kabupaten Bangka, dua orang dari Kabupaten Belitung, dan satu orang dari Kotamadya Pangkalpinang. Kedudukan Presidium berada di Bangka, Ketua Presidium secara periodik untuk jangka waktu satu tahun.

Ketua Presidium dibantu oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di Bangka (Kotamadya Pangkalpinang).Penggantian anggota formatur dari Drs. Rusli Rachman dengan Irham. Tugas formatur melangkapi personalia Presidium. Formatur dinyatakan selesai tugasnya apabila Presidium telah disahkan. Keputusan-keputusan Tanjung Kelayang masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.

Pada tanggal 30 Januari 1969 Agreement Bersama Antar Utusan Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, Kotamadya Pangkalpinang menetapkan:

1. Pengesahan berdirinya Presidium Perjuangan Provinsi Bangka Belitung, dilakukan oleh DPRD-GR Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung dan Kotamadya Pangkalpinang dengan catatan bahwa pengesahan tersebut selambat-lambatnya tanggal 25 Februari 1969 harus sudah disahkan.
2. Memberikan kuasa penuh kepada Presidium Perjuangan Provinsi Bangka Belitung untuk segala usaha terwujudnya Provinsi Bangka Belitung yang riil dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
3. Presidium Perjuangan Provinsi Bangka Belitung, didirikan atau dibubarkan oleh musyawarah ketiga daerah, Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung dan Kotamadya Pangkalpinang.
4. Menyampaikan appeal kepada Pemerintah Daerah Sumatera Selatan agar merestui dan memberikan dukungan yang positif dan kepada Pemerintah Pusat c.q Menteri Dalam Negeri, agar menempatkan persoalan peningkatan Bangka dan Belitung menjadi Provinsi ini dalam agenda pembicaraan yang urgent.

Akutansi perjuangan dan dukungan semakin terarah saat DPRD-GR Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, dan Kotamadya Pangkalpinang

melalui surat Nomor: 767/47-890/30/69 tanggal 29 Oktober 1969 perihal Aspirasi Rakyat Bangka Belitung untuk meningkatkan Ex. Keresidenan Bangka Belitung menjadi Satu Provinsi/Daerah Tingkat I menulis surat yang ditujukan kepada: Menteri Dalam Negeri, melalui Gubernur Provinsi Sumatera di Jakarta, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong di Jakarta, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara di Jakarta, Ketua DPRD-GR Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

Isi surat yang ditandatangani ketua DPRD-GR Kabupaten Bangka A.Razak, Kabupaten Belitung A. Hamid Achmad, dan Kotamadya Pangkalpinang Bakri H. Usman dan ikut mengetahui serta merestui Kepada Daerah Kabupaten Belitung H.A Hanandjudin, Walikota Kepala Daerah Kotamadya Pangkalpinang Drs. Rustam Effendi, serta disalin oleh Kepala Bagian Sekretaris Dewan Badri Umarbaki berisi:

1. DPRD-GR Ketiga daerah menyampaikan Naskah Perjuangan Bangka Belitung menjadi Provinsi. DPRD-GR tahu benar dan yakin, dan dapat mempertanggungjawabkan bahwa aspirasi Rakyat Bangka Belitung untuk meningkatkan daerahnya menjadi satu Provinsi dengan hak-hak Otonomi penuh, sesungguhnya telah ada dan terus tumbuh serta meningkatkan sejak bertahun-tahun. Dan, pengalaman serta situasi, kondisi dan potensi daerah memang merupakan dasar yang layak dan kuat bagi keinginan serta tuntutan itu.
2. Kiranya tidak salah pula kalau dikatakan, bahwa Bangka Belitung dalam bentuk dan status Daerah Tingkat I yang berdiri sendiri dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini, akan lebih menguntungkan kepentingan Nasional dan akan dapat lebih langsung dan efektif turut mensukseskan Pembangunan Lima Tahun. Maka sudilah pada kesempatan ini untuk mempersiapkan segala sesuatunya mulai dari sekarang, guna menyongsong Provinsi idaman itu.
3. Kiranya permohonan rakyat dan jika perlu secepat mungkin mengusahakan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang untuk realisasinya, sebagaimana telah dilakukan dalam Pembentukan Provinsi Lampung dan Bengkulu beberapa tahun yang lalu.

Berkat lobi, baik dari Presidium maupun dari pimpinan Partai Politik, maka dalam Sidang Pleno DPRD-GR Provinsi Sumatera Selatan yang dihadiri oleh Presidium dan Pimpinan Partai Politik di Bangka dan Belitung, lahirlah SK. DPRD-GR Sumatera Selatan tentang Persetujuan Pembentukan Provinsi

Bangka Belitung melalui SK. No. 18/DPRD-GR/Sumatera Selatanb/1969-1970/tanggal 11 Maret 1970.

Berbekal SK. DPRD-GR Sumatera Selatan ini, serta buku atau naskah Perjuangan Provinsi Bangka Belitung (feasibility study), Presidium mengadakan pertemuan dan lobi dengan Pimpinan DPR-GR Pusat, dan pada saat itu dipimpin oleh Ben Mangrengsai dan Domo Pranoto, serta bertemu pula dengan Komisi III DPR-GR.

Dalam pertemuan tersebut dijabarkan pula alasan-alasan mengapa masyarakat Bangka Belitung ingin menjadi Provinsi sendiri. Alasannya karena;

1. Secara historis, Bangka Belitung adalah Ex. Keresidenan yang satu-satunya di
2. daerah Sumatera Selatan yang belum menjadi Provinsi.
3. Penempatan tenaga kerja yang tidak wajar dan tidak adil.
4. Birokrasi yang menghambat gerak maju pembangunan danb menimbulkan high eost (biaya tinggi).
5. Tidak punya otoritas mengatur rumah tangga sendiri.
6. No right to decide what must be done to develop our region. Bukti pembangunan yang tidak memadai bagi daerah penghasil timah yang begitu tinggi.
7. Secara kultural daratan Sumatera Selatan dengan daerah Kepulauan Bangka Belitung sangat berbeda.

Selain mengadakan pertemuan, disepakati pula bahwa DPR-GR akan mengirim dan meninjau ke Bangka Belitung. Peninjauan dilakukan pada tanggal 20-27 April 1970 oleh empat Anggota Komisi III DPR-GR, yaitu Domo Pranoto (sebagai Ketua Tim), Drs. Rulinus Lahur, LS Handokowidjojo, dan II, Djen Moch Surjopranoto.

Setelah melihat dan mengalami sendiri aspirasi masyarakat Bangka Belitung yang begitu bergelora dan bersemangat ingin mewujudkan Bangka Belitung menjadi Provinsi, tim dari DPRD-GR LS Handokowidjojo mulai membuat Draft Rancangan Undang-Undang (RUU) usul inisiatif tentang pembentukan Provinsi Bangka Belitung di Hotel Menumbing Mentok, tempat Presiden Pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno diasingkan. Drait RUU ini dibawa ke Jakarta lalu disempurnakan pada tanggal 4 Juni 1970 diajukan kepada DPR-GR dengan pengusul 24 anggota DPR-GR.

Pada tanggal 4 Juli 1970, melalui surat No. 048/A/IV/UI/1969-970 I.S Handokowidjojo mengajukan surat RUU sebagai Usul Inisiatif kepada Ketua DPR-GR. Usul Inisiatif ini diajukan sesuai dengan aspirasi rakyat Bangka

Belitung serta peninjauan Bagian "B" dan Komisi III DPR-GR pada tanggal 20 sampai dengan 27 April 1970.

RUU Usul Inisiatif ini dibicarakan di Badan Musyawarah tanggal 20 Agustus 1970. Kemudian diputuskan untuk dibawa ke acara Sidang Paripurna DPR-GR tanggal 28 Agustus 1970, Presidium pun di undang dan hadir pada saat itu. RUU Usul Inisiatif ini merupakan RUU Usul Inisiatif yang pertama yang diajukan oleh DPR-GR karena selama ini RUU datang dari pihak Pemerintah.

Dalam acara sidang yang dilaksanakan tanggal 28 Agustus 1970 tersebut, I.S Handakowidjojo membacakan pidatonya; saudara Ketua yang terhormat, saudara-saudara Menteri dan saudara-saudara sekalian yang kami hormati. Jika kita memperhatikan dengan seksama tentang perkembangan ketatanegaraan di negeri kita, khususnya dalam bidang pemerintahan daerah, maka jelaslah bahwa terdapat kemajuan-kemajuan berjalan cepat sesuai dengan gerak dan iramanya revolusi di negeri kita. Walaupun demikian, kadang-kadang masih belum sesuai dengan harapan masyarakat di daerah-daerah. Maka tidak mustahil, bahwa sering sekali DPR-GR, maupun Pemerintah Pusat kedatangan Delegasi-Delegasi dari pelosok-pelosok tanah air, perlu menyampaikan usul-usul yang berupa pemekaran daerah dan sebagainya.

Akhirnya pada tanggal 20 Agustus 1970 Panitia Musyawarah dalam rapatnya telah memutuskan bahwa pada hari ini tanggal 28 Agustus 1970, RUU usul inisiatif tentang pembentukan Provinsi Bangka Belitung menjadi acara dalam sidang Paripurna ialah pembicaraan Tingkat I.

Pembicaraan tahap selanjutnya diteruskan, namun sayang tidak sampai tahap akhir karena waktu itu ada Pemilihan Umum dan anggota Presidium diminta untuk membantu mensukseskan Pemilihan Umum dulu. Namun apa hendak dikata, setelah pemilihan umum selesai, para anggota DPR-GR diganti termasuk para pengusul RUU Usul Inisiatif tersebut. Nasib Pembentukan Provinsi Bangka Belitung pun semakin pudar dan tenggelam dan tak bergema lagi, baik di tingkat Pusat maupun daerah.

Namun, masyarakat Bangka Belitung mungkin merupakan masyarakat yang gigih serta tidak mudah putus asa. Ini terbukti dari ujaran penduduk Bangka Belitung yang timbul berkenaan kegagalan perjuangan pada era 1956 dan 1966-1970 tersebut.

Dikatakan, karena dalam melakukan start orang sering menghitung satu dan dua sebagai aba-aba dan dalam hitungan ke tiga setelah start baru bermula, maka anggap saja kegagalan ke satu dan kedua itu sebagai aba-aba

atau ancang-ancang siaga saja. Start yang sebenarnya dan yang akan mencapai finish adalah start saat hitungan yang ketiga, yaitu saat perjuangan itu digelar kembali pada tahun 1999-2000.

Optimisme bahwa perjuangan tahun 1999-2000 akan membawa keberhasilan, tampaknya memang bukan tanpa alasan. Sebagai misal, kalau saja pada tahun 1970 DPRD-GR Sumatera Selatan telah setuju serta menganggap Bangka Belitung mampu dan dewasa menjadi sebuah Provinsi, maka adalah mustahil dan naif kalau 30 tahun sejak itu, masyarakat di kedua pulau itu dianggap sebagai belum dewasa dan belum mampu.

Keyakinan di atas tampaknya makin diperkuat oleh fakta bahwa kegagalan tahun 1970 lebih dikarenakan faktor nasib saja, yaitu bubarnya DPR-GR dan bukan oleh faktor lain.

4.1.3 Perjuangan Melalui Media Cetak

Pada tanggal 20 Januari 1999, di kediaman rumah dinas Walikota Pangkalpinang di jalan Merdeka terjadi perbincangan tentang keinginan untuk menjadikan Bangka Belitung sebuah Provinsi. Pada saat itu, Walikota Pangkalpinang masih dijabat oleh Drs. H. Sofyan Rebuin. Mereka yang hadir pada saat itu antara lain, Johan Murod S.IP, Ir.Edy Jajang, Shensei Rasidi, Ir. Azhar Romli, dan Drs. H.Sofyan Rebuin. Dan, pada tengah malam hari itu juga, Edy Jajang dan Johan Murod menyiapkan berita untuk dimuat di Harian Umum Sriwijaya Post, Palembang.

Pada tanggal 21 Januari 1999, di Harian Umum *Sriwijaya Post* muncul berita yang berjudul, **“Bangka Belitung Layak Jadi Provinsi”**. Dalam berita disebutkan secara ekonomi dan budaya, luas wilayah, sumber daya manusia, dan historis. Wilayah Bangka Belitung layak menjadi sebuah Provinsi. Dan, pokok-pokok pikiran kearah tersebut sedang dirumuskan elit perantaraan Bangka Belitung yang tersebar di kota-kota besar di Pulau Jawa terutama Jakarta, Jogjakarta dan Bandung.

Selanjutnya, pada tanggal 27 Januari 1999, *Sriwijaya Post* memuatkan kembali berita tentang ide pembentukan Provinsi Bangka Belitung dengan narasumber Gubernur Sumatera Selatan. Pada intinya Gubernur Sumatera Selatan bersedia berembuk dan merespon keinginan masyarakat Bangka Belitung perantaraan yang menghendaki Bangka Belitung menjadi Provinsi.

Berlanjut pada tanggal 5 Februari 1999, *Sriwijaya Post* kembali memuatkan berita dengan judul, **“Gagasan Provinsi Bangka Belitung Merupakan Hak”**. Isi tulisan memuat pernyataan pra tokoh masyarakat, mahasiswa, dan Nasional Bangka Belitung yang berada di Jakarta.

Mantan anggota DPR/MPR RI Periode 1992-1997 Emron Pangkapi mengatakan Bangka Belitung itu Ex. Keresidenan. Maka, bila ditarik garis ke belakang, keinginan menjadi Provinsi itu tidak bisa disebut sebagai tuntutan, tapi yang tepat merupakan *repositioning*.

Tanggal 11 Februari 1999 Tabloid *Demo* menulis, selama ini daerah-daerah merasa hanya di eksploitasi untuk memenuhi keinginan penguasa di Pusat (Jakarta). Daerah-daerah yang memiliki kekayaan alam, merasa kebijakan Pemerintah seperti ini tidak adil. Ditulis juga, keberanian rakyat menuntut otonomi lebih luas yang muncul di Bangka Belitung. Sebenarnya hal yang wajar, tak berlebihan pula bila rakyat di kedua daerah (Bangka dan Belitung) tersebut menuntut untuk menjadi Provinsi sendiri.

Pada tanggal 12 April 1999, *Sriwijaya Post* memuat opini Johan Murod, S.Ip sebagai Ketua Badan Khusus Pemuda HKTI Kotamadya Pangkalpinang berjudul, "**Bisakah Bangka Belitung Jadi Wiayah Provinsi?**". Melalui opini ini, Johan mengajak masyarakat untuk menyatukan semangat ke arah terbentuknya Provinsi Bangka Belitung. Jadi tidaknya Bangka Belitung sebuah Provinsi, menurut Johan sangat tergantung sejauhmana peran serta masyarakat di dua daerah kepulauan ini.

Pembentukan opini publik melalui media masa semakin menggelora dengan kehadiran Harian Pagi *Bangka Pos* pada tanggal 25 Mei 1999. Dengan motto "*Yo Kite Punye Provinsi*" seolah semakin memantapkan perjuangan yang selama ini tersendat-sendat. Tetapi pada masa publikasi ini, tak satupun ada catatan tentang dukungan dari lembaga formal untuk membentuk Provinsi Bangka Belitung. Semangat tersebut baru muncul dari orang-perorang.

Tak ketinggalan juga Tabloid *Suara Bangka* menyuarakan keinginan masyarakat Bangka Belitung untuk lepas dari Povinsi induk, Sumatera Selatan. Emron Pangkapi selaku Wakil Ketua Komite Perjuangan Provinsi Bangka Belitung di edisi 9 Oktober 1999 mengatakan perjuangan pembentukan Provinsi Bangka Belitung akan melibatkan seluruh sosial politik, militer, sipil dan budaya dalam sebuah gerakan massal.

4.1.4 Perjuangan Melalui Dewan Pemuda

Selepas Sholat Jumat, pada tanggal 18 Juni 1999 Dewan Pemuda Bangka Belitung mengadakan pertemuan di Gedung Hamidah Pangkalpinang dan pada saat itu tak kurang sekitar 300 pemuda Bangka Belitung yang hadir. Dalam pertemuan tersebut dibacakan deklarasi :

1. Bahwa Bangka Belitung secara geografis adalah dua pulau besar dan puluhan pulau kecil lainnya yang terletak di Selat

Karimata merupakan pulau-pulau yang strategis dari berbagai aspek dan terpisah dari Pulau Sumatera.

2. Bahwa secara sosiologis masyarakat Bangka Belitung adalah masyarakat yang memiliki persamaan adat dan kebiasaan yang disebut masyarakat Adat Bangka Belitung.
3. Bahwa secara historis Bangka Belitung adalah salah satu Keresidenan dari 16 Keresidenan yang pernah ada dalam Sistem Tata Negara Indonesia. Dan Bangka Belitung pernah menjadi salah satu Negara Bagian Masa Pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS).

Selain itu, Dewan Pemuda Bangka Belitung juga mengeluarkan Piagam Deklarasi Dewan Pemuda Bangka Belitung ;

1. Dewan Pemuda Bangka Belitung bersama-sama masyarakat Bangka Belitung akan memperjuangkan Bangka Belitung untuk menjadi satu wilayah Provinsi Bangka Belitung.
2. Dewan Pemuda Bangka Belitung akan selalu tampil di depan demi membela kepentingan masyarakat Bangka Belitung.

Dewan Pemuda Bangka Belitung juga mengeluarkan Pernyataan Sikap Dewan Pemuda Bangka Belitung yang berisi :

1. Agar Pemerintah Pusat Republik Indonesia memberi status kepada Bangka Belitung menjadi Provinsi yang bernama Provinsi Bangka Belitung sejalan dengan pengembangan Daerah Tk. II yaitu Kotamadia Dati II Pangkalpinang ditetapkan sebagai Ibukota Provinsi, Kabupaten Bangka Utara Ibukota Sungailiat, Kabupaten Bangka Barat Ibukota Mentok, Kabupaten Bangka Selatan Ibukota Koba, Kabupaten Belitung Timur Ibukota Manggar, dan Kabupaten Belitung Barat Ibukota Tanjungpandan.
2. Mendukung putra Bangka Belitung Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra,SH,M.Sc sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke IV dan setidaknya pada pembentukan Kabinet Reformasi yang akan datang dapat menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri sesuai dengan kemampuannya.
3. Agar Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah tidak lagi berkeinginan membuang lumpur dari Singapura ke Bangka Belitung.
4. Ekonomi kerakyatan yang telah dicanangkan supaya diimplementasikan dengan memberi kredit secara insentif

kepada petani dan nelayan, karena sektor ini telah memberi kontribusi yang berarti terhadap pendapatan masyarakat maupun devisa negara.

5. Agar pihak yang berwenang menindak setiap pelanggaran penangkapan ikan dip perairan Bangka Belitung oleh kapal asing dan memberi hukuman sesuai ketentuan yang berlaku serta mengamankan perairan Bangka Belitung dari perompak yang selalu merompak para nelayan maupun kapal-kapal lainnya yang sedang berlayar di perairan Bangka Belitung.
6. Mengingat rawannya perairan Bangka Belitung dari aspek keamanan maupun aspek pertahanan nasional kiranya di Bangka Belitung dibangun Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) dan Pangkalan Udara (Lanud).
7. Demi pembangunan Bangka Belitung danantisipasi era pasca timah kiranya saham Pemerintah Pusat sebesar 65 persen dari PT. Timah diberikan kepada Pemerintah Daerah Bangka Belitung sebesar 30 persen.
8. Setiap pengangkatan harta karun pada sejumlah kapal Pra VOC maupun VOC dari perairan Bangka Belitung, Pemerintah Daerah di Bangka Belitung mendapat bagian sebesar 30 persen.

Melalui pertemuan Dewan Pemuda Bangka Belitung pada tanggal 18 Juni 1999 di Gedung Hamidah Pangkalpinang ini, dideklarasikan pula Komite Perjuangan Pembentukan Provinsi Bangka Belitung.

Dari acara Deklarasi Dewan Pemuda Bangka Belitung, akhirnya dibentuklah Komite Perjuangan Provinsi Bangka Belitung (KPPBB). Melalui kerja formatur antara lain Marcianus Suban, Hamdan, Frans Adaw dan lainnya. Terpilih sebagai Ketua KPPBB Drs. Achmad Rusdi dengan Sekretaris Umum Johan Murod, S.Ip. Sedang beberapa Wakil Ketua Dharma Sutomo, SH, Zulkarnain Zubir, SH dan Effendi Harun. Bendahara Osfindinar dan Dedek Diana Sita AP, Penasehat antara lain H. Romawi Latief, Amung Tjandra dan Drs. Ali Asgar.

Terbentuknya KPPBB pada tanggal 18 Juni 1999 ini merupakan awal dari langkah nyata perjuangan generasi ketiga setelah generasi tahun 1956 dan tahun 1966-1970 dalam memperjuangkan terbentuknya Provinsi baru. Babak ini menandai bahwa soliditas rakyat tetap mengental di dua daerah yang dalam perjalanan sejarah terdahulu selalu senasib dan sepenanggungan.

Namun perjuangan memang tidak semulus yang diharapkan, masa-masa sosialisasi dan publikasi terus memeras pikiran. KPPBB tak bosan untuk

selalu menulis opini di surat kabar lokal maupun nasional. Keberadaan sejumlah insan pers lokal di Bangka Belitung, terus mempublikasikan di media massa hingga perjuangan generasi ketiga ini.

KPPBB berusaha meminta kepada DPRD Pangkalpinang, Kabupaten Bangka dan Belitung untuk membuat surat tuntutan pembentukan Provinsi Bangka Belitung untuk disampaikan kepada Presiden dan DPR RI. Masyarakat harus satu misi dan visi untuk merealisasikan perjuangan pembentukan provinsi ini. Dan, KPPBB melayangkan surat kepada Ketua DPRD Kota Pangkalpinang Periode 1997-1999 dengan No. 14/KPPBB/VIII/1999 yang ditandatangani Zulkarnain Zubir, SH dan Johan Murod. Sebagai Ketua DPRD Kota Pangkalpinang pada saat itu, Hudarni Rani mengatakan pihaknya juga akan meminta pimpinan dan anggota dewan di periode selanjutnya untuk mendukung perjuangan pembentukan Provinsi Bangka Belitung. Dan, Hudarni berharap dalam era reformasi ini, Pemerintah Pusat mengabdikan tuntutan masyarakat Bangka Belitung.

Pada tanggal 21 Agustus 1999, di ruang lobi Hotel Atlen Century lantai 19 di kawasan Senayan Jakarta, dipenuhi sekitar 100 orang peserta, baik dari birokrat maupun tokoh masyarakat dari ketiga daerah, Kabupaten Bangka Belitung, maupun Pangkalpinang, serta elemen masyarakat Bangka Belitung yang ada di Jakarta yang tergabung dalam MKMB, yang juga selaku penyelenggara seminar dan diskusi yang bertajuk Skenario Membangun Bangka ke Depan dengan tokoh-tokoh Nasional yang hadir sebagai pembicara Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, Dr. Andi Mallarangeng, Ir. Ichyar Musa, Kol. TNI Herman Ibrahim (Kare Humas Depdagri), Gubernur Sumatera Selatan yang dijadwalkan sebagai pembicara berhalangan hadir dan hanya diwakilkan kepada Asisten I Sekwilda, Amran Harun, SH.

Semula diskusi tersebut diarahkan untuk merekomendasi substansi materi dalam merumuskan skenario pembangunan Bangka ke depan. Ternyata yang mengemuka dari awal adalah tuntutan Pembentukan Provinsi Bangka Belitung yang terpisah dari Provinsi Sumatera Selatan.

Semangat dari peserta yang hadir untuk menyuarakan keinginan membentuk Provinsi seperti tak terbendungkan, sehingga keseragaman suara itu mirip koor "*pokoknya! Provinsi Bangka Belitung*" sehingga forum diskusi itu menjadi ajang mengekspresikan aspirasi yang sudah lama terpendam sejak dari tahun 1956. Muara Provinsi seperti telah menjadi keinginan yang tak bisa ditawarkan lagi dan harus segera diperjuangkan, maka Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra yang saat itu menjabat Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) menyatakan siap berperan aktif memperjuangkan tuntutan Provinsi dan ia

berjanji akan melobi fraksi-fraksi DPR RI untuk merumuskan RUU Inisiatif Provinsi Bangka Belitung.

4.1.5 Membentuk Komite Perjuangan Bangka Belitung di Jakarta

Pada tanggal 22 Agustus 1999, tempat kediaman Ir. Azhar Romli di Jakarta digelar pertemuan atau rapat Pembentukan Komite Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari pertemuan itu, memutuskan beberapa hal penting, terkait Perjuangan Pembentukan Provinsi Bangka Belitung, antara lain:

1. Mendeklarasikan secara bersama Pembentukan Komite Perjuangan Provinsi Bangka Belitung di Jakarta
2. Menyusun struktur organisasi Komite dengan susunan sebagai berikut:

a. Majelis Kajian, terdiri dari:

- Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra - Ichyar Musa
- Samsir Yacob Alis - Rosidi
- Irwan Saleh - Ch. Muhammad Muas
- Prof. Dr. Harun Al Rasid - Dr. Djamaludin Ancok
- Drs. H. Rusli Rahman - Dr. Abubakar Harun
- Dr. Bustami Rahma - Ir. Sutejo Sujitno (Sekretaris)

b. Pengurus Harian:

- Ketua : Rusman Rohiman
- Wakil Ketua : - Darmansyah Husein
- Azhar Romli
- Sekretaris : Aswandi Ur
- Wakil : Jamain Amad

3. Menyepakati pembagian tugas kerja sebagai berikut:

- a. Komite Perjuangan Provinsi Bangka Belitung di Bangka mengirim surat pernyataan/dukungan Provinsi Bangka Belitung kepada DPRD Pangkalpinang, DPRD Kabupaten Bangka dan DPRD Kabupaten Belitung.
- b. Majelis Kajian Komite PPBB di Bangka membuat kajian/kelayakan Provinsi Bangka Belitung yang isinya mengangkat Ipoleksosbud Hankam.
- c. Komite PPBB di Jakarta menghubungi atau mengadakan pendekatan kepada Mendagri dan DPR RI.

4. Agenda kerja Komite PPBB di Jakarta:

- a) Membuat kop surat

- b) Mengadakan Malam Peduli Masyarakat Bangka Belitung
- c) Mengadakan lobi kepada Instansi terkait di Tingkat Pusat
- d) Mengadakan rapat Komite untuk selanjutnya.

Pada tanggal 23 Agustus 1999, Harian *Republika* menurunkan berita seputar kegiatan seminar dan diskusi yang dimotori oleh MKMB, “Skenario Pembangunan Bangka ke Depan” di Hotel Century Park Jakarta tanggal 21 Agustus 1999. Dengan judul **“Provinsi Bangka Belitung Aspirasi Warga Penghasil Timah”**.

Harian *Republika* pada tanggal 23 Agustus 1999, mengutip pernyataan Yusril yang mengatakan, “Saya kira orang Bangka Belitung itu baik-baik, tidak berpikir negara paling tinggi mereka memimpikan Provinsi sendiri”.

Dalam era reformasi tuntutan pembentukan Provinsi adalah hal yang wajar. Dan, Bangka Belitung telah memulainya sejak tahun 1956, telah menjadi isu Nasional dan akan dibahas pada Rapat Paripurna DPR RI mendatang. Untuk itu, maka dibutuhkan dukungan penuh masyarakat, Pemerintah Daerah dan DPRD Pangkalpinang, Bangka dan Belitung. Karena itu, menurut Yusril langkah strategis berikut adalah mengajukan RUU Pembentukan Provinsi Bangka Belitung.

Pada tanggal 26 Agustus 1999, DPRD Kotamadya Pangkalpinang mengeluarkan SK No. 09 tahun 1999 tentang persetujuan terhadap perjuangan status Kepulauan Bangka Belitung menjadi Provinsi Bangka Belitung. Surat tersebut ditandatangani oleh: Ketua DPRD Kotamadya Pangkalpinang Hudarni Rani, Wakil Ketua Abdul Aziz Lubis, Badaruddin Usman dan Ketua Fraksi Karya Pembangunan A. Malik Yazid dan Sekretaris Faried Effendi, Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan Drs. Zakaria Ismail dan Sekretaris Hamzah Suhaimi, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Ida Kumala, SH serta ketua Fraksi ABRI Abdul Azis Lubis dan Sekretaris Arif Pirijanto.

Surat Keputusan DPRD Kotamadya Pangkalpinang memutuskan dan menetapkan:

1. Mendukung sepenuhnya upaya perjuangan Pembentukan Provinsi Bangka Belitung dengan wilayah eks Keresidenan Bangka Belitung oleh Komite Perjuangan Provinsi Bangka Belitung sejak tahun 1956.
2. Keputusan ini dikeluarkan untuk dapat dijadikan sebagai dasar perjuangan (legal action) bagi seluruh masyarakat dengan memperhatikan semua aspek yang terkait khususnya bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan

keamanan.

Pada tanggal 31 Agustus tahun 1999 di kediaman Mas'ud di Jakarta, diadakan Rapat Komite Perjuangan Provinsi Bangka Belitung. Dalam rapat tersebut memutuskan beberapa hal yakni:

1. Follow up surat KPPBB kepada DPRD Kota Pangkalpinang, DPRD Kabupaten Bangka, dan Kabupaten Belitung, dengan membuat surat Ketetapan Dewan tentang Bangka Belitung layak menjadi Provinsi.
2. Action/demonstrasi masyarakat untuk melakukan tuntutan agar DPRD Tk. II membuat ketetapan.
3. Pembuatan kop surat
4. Melengkapi personalia anggota Majelis Ahli dan Pelaksana
5. Penerbitan kronik Perjuangan Provinsi Bangka Belitung
6. Pendekatan ke Ichyar Musa dan Sofyan Effendi
7. Pertemuan pleno
8. Action: Tuntutan masyarakat ke DPR (Komisi I) dan Mendagri
9. Membalas surat dan menyerahkan
10. Penggalangan dana dengan melakukan acara Malam Sambung Rasa Masyarakat Bangka Belitung.

Selanjutnya, pada tanggal 8 September 1999 masih di rumah Mas'ud di Jakarta Rapat Komite Perjuangan Provinsi Bangka Belitung memutuskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menyusun/melengkapi anggota Komite Perjuangan Provinsi Bangka Belitung baik dalam Kelompok Majelis Kajian maupun Kelompok Komite Eksklusif.
2. Mengadakan pertemuan pada tanggal 19 September 1999 untuk memantapkan rencana aksi politik dalam penyiapan materi pernyataan sikap.
3. Melaksanakan penyampaian aspirasi ke DPR RI dan Ditjen, DPOD
4. Mengadakan pertemuan antara Komite Bangka, Belitung dan Komite Jakarta
5. Membuat/menyusun substansi statement yang akan disampaikan.

Pada tanggal 21 September 1999, KPPBB di Bangka Belitung dan Jakarta membuat dan mengajukan surat pernyataan menuntut terbentuknya Provinsi Bangka Belitung kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah

Daerah yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Sejak perjuangan Provinsi Bangka Belitung dimulai tahun 1956 sampai pada era reformasi, semangat masyarakat Bangka Belitung terus bergelora untuk meningkatkan status daerahnya. Hal ini terdorong oleh keinginan yang kuat untuk lebih meningkatkan peran sertanya dalam Pembangunan Nasional di segala bidang, khususnya dengan meningkatkan kualitas ekonomi, sosial dan budaya daerah Bangka Belitung. Keinginan tersebut akan sulit terpenuhi tanpa melalui ikhtiar peningkatan status pemerintahan Bangka Belitung menjadi provinsi sebagaimana aspirasi masyarakat daerah ini yang sejak lama diperjuangkan.
2. Bahwa dari lima daerah keresidenan yang ada di wilayah Sumatera bagian Selatan (Sumbagsel) hanya Bangka Belitung yang tidak/belum dijadikan Daerah Tingkat I/Provinsi. Keresidenan Bangka Belitung dihapuskan dan diubah menjadi daerah Ex. Keresidenan melalui Perpu No. 3 tahun 1950, kemudian dengan UU darurat No. 4 tahun 1956 ditetapkan sebagai Daerah Kabupaten. Selanjutnya, dengan UU No. 25 tahun 1959 Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung tetap dimasukkan dalam Provinsi Sumatera Selatan bersama Bengkulu, Lampung maupun Jambi yang kini semuanya telah berstatus Provinsi.
3. Bahwa sejak tahun 1959 masyarakat Bangka Belitung dengan dipelopori oleh para tokoh masyarakatnya pada waktu itu telah mengajukan permohonan kepada Pemerintah melalui DPRD untuk meningkatkan status daerah Bangka Belitung menjadi suatu Provinsi. Selanjutnya, bersama-sama dengan usulan pemekaran daerah-daerah di Sumatera bagian Selatan. Pada tahun 1964-1967, masyarakat Bangka Belitung terus berjuang menuntut peningkatan daerahnya menjadi Daerah Otonomi Tingkat I. Perjuangan tersebut terus dilakukan sampai awal tahun 1970-an, dimana pada waktu itu telah berhasil dipersiapkan Rencana Undang-Undang (RUU) Provinsi Bangka Belitung sebagai usul Inisiatif DPR-GR dan telah selesai dibahas pada Tingkat II.
4. Bahwa secara historis Bangka Belitung tidak termasuk dalam wilayah Kesultanan Palembang, Bangka Belitung dimasukkan

sebagai bagian wilayah Kesultanan Palembang oleh Belanda dengan tujuan legitimasi penguasaannya atas daerah yang kaya mineral timah ini dan faktor keamanan. Selain itu, Bangka Belitung memiliki sosial budaya yang berbeda dengan Sumatera Selatan.

5. Bahwa perjuangan masyarakat Bangka Belitung untuk menjadikan daerah ini berstatus Provinsi adalah berdasarkan pertimbangan obyektif atas potensi SDM, SDA, geografis dan sosio-kultural yang dimiliki. Setiap potensi tersebut dapat dijabarkan dalam suatu studi yang komprehensif, terutama dalam kaitannya dengan prospek pengembangan sektor modern di daerah ini. Daerah Bangka Belitung berpenduduk sekitar 1.000.000 jiwa, memiliki luas wilayah daratan 16.681,7 kilometer persegi dengan kandungan berbagai mineral yang sudah dieksploitasi (timah) maupun yang belum, dan perairan laut yang selain luas juga kaya plankton sehingga berpotensi untuk menjadi salah satu sentra produksi perikanan di tanah air. Kenyataan ini menunjukkan bahwa Bangka Belitung sangat layak untuk mengembang status Provinsi.
6. bahwa terwujudnya Provinsi Bangka Belitung merupakan tuntutan maksimal, sebab masyarakat Bangka Belitung sangat loyal dan bangga bernaung di bawah panji-panji Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sudah saatnya sekarang untuk merentas segala sikap politis yang keliru selama ini, dimana Bangka Belitung dijadikan semacam "*sapi-perah*" dan "*habis manis, sepah dibuang*".

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka KPPBB di Jakarta serta Bangka Belitung atas nama segenap golongan dan lapisan masyarakat Bangka Belitung menyatakan tuntutan:

1. Aspirasi status daerah Bangka Belitung menjadi Provinsi yang telah diusulkan oleh DPRD-GrR tahun 1970 dalam bentuk Rancangan Undang-Undang usul Inisiatif, sekaligus dengan Pemekaran Daerah Kabupaten Bangka dan Belitung agar dapat diterima dan disetujui oleh komisi II DPR RI.
2. Mengharapkan kepada DPR RI berkenan melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Usul Inisiatif dimaksud point (I) di atas yang sempat terhenti.
3. Berkenaan dengan masa tugas DPR RI Periode 1997-1999

segera berakhir, maka tuntutan ini dimohonkan dengan sangat dapat diagendakan dalam sidang Komisi II DPR RI Periode 1999-2004 dan segera dijadikan sebuah ketetapan.

Masih pada tanggal yang sama, KPPBB menegaskan dasar-dasar tuntutan masyarakat guna mewujudkan terbentuknya sebuah Provinsi baru yang terlepas dari naungan Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

- Daerah Bangka Belitung merupakan daerah Keresidenan yang kemudian melalui Perpu No. 3 tahun 1950, tentang Ex. Keresidenan daerah Bangka Belitung dihapuskan menjadi keresidenan dan membentuk DPRD Ex. Keresidenan. Kemudian dengan UU Darurat No. 4 tahun 1956 daerah Bangka Belitung ditetapkan menjadi Kabupaten.
- Selanjutnya dengan UU No. 25 tahun 1959 Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung tetap dimasukkan dalam Provinsi Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), bersama Bengkulu, Palembang, dan Lampung.
- Setelah kurang lebih delapan tahun Kabupaten Bangka dan Belitung masuk ke dalam Provinsi Bagian Sumatera bagian Selatan, dan sejalan dengan perkembangan “masa transisi” Orde Lama-Orde Baru tahun 1964-1967 masing-masing daerah termasuk Bangka Belitung berusaha berjuang menuntut peningkatan Daerah Otonomi Tingkat I.
- Tindakan untuk memperjuangkan Bangka Belitung untuk menjadi Provinsi saat itu terus dilakukan bahkan telah diproses sampai ke tahap akhir di tingkat DPR RI dan Mendagri (tahun 70-an), tetapi belum ada penyelesaiannya.
- Jika dilihat mengenai potensi yang ada di Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung dan Kotamadya Pangkalpinang, baik dalam potensi SDA, SDM, potensi ekonomi keuangan, potensi sarana dan prasarana, sosial budaya dan potensi Hamkamnas, jika dikelola dengan profesional dapat untuk membiayai sendiri Provinsi Bangka Belitung.
- Demikian pula jika dilihat dari syarat-syarat formil yang ada, baik dari luasnya kurang lebih 16.681,700 km², jumlah penduduk kurang lebih 1.000.000 jiwa dari jumlah Kabupaten dan Kotamadia yang ada.
- Dilihat dari keinginan kuat masyarakat adalah betul-betul mencerminkan kehendak seluruh rakyat Bangka Belitung yang telah

diperjuangkan sekian lama. Bukti nyata dapat dilihat dalam pernyataan-pernyataan, ikrar bersama, keputusan-keputusan, proposal-proposal, keputusan DPRD, alim ulama, pimpinan masyarakat dari segala lapisan.

- Dipandang dari segala aspek, Daerah Bangka Belitung sudah sangat layak ditingkatkan menjadi Daerah Otonomi Tingkat I/Provinsi. Hal ini terbukti secara nyata dalam dasar-dasar landasan hukum, syarat-syarat formil materi serta potensi bidang/ sektor terkait lainnya.

Bersama dengan dikirimkannya surat pernyataan menuntut terbentuknya Provinsi Bangka Belitung kepada Pemerintah pada tanggal 21 September 1999, hari itu juga, Komite Perjuangan Provinsi Bangka Belitung dengan diiringi oleh Pengurus Komite, tokoh masyarakat Bangka Belitung serta mahasiswa Bangka Belitung yang ada di Jakarta mengadakan pertemuan dengan Komisi II DPR di Gedung DPR/MPR RI Jakarta.

Pada pertemuan tersebut, komisi II DPR RI menerima dengan baik pernyataan sikap dari komite Perjuangan Provinsi Bangka Belitung yang menuntut agar segera dibentuknya Bangka dan Belitung menjadi Provinsi tersendiri, dan lepas dari Provinsi Sumatera Selatan. Demikian pula dengan anggota Komisi II lainnya yang hadir memberikan respon yang cukup baik.

Dalam pertemuan itu pula Pimpinan Rapat dari Komisi II DPR RI memberikan arahan maupun tata cara penyampaian dan penyelesaian administrasi secara birokrasi. Dengan demikian secara politis pernyataan sikap ini sudah disetujui, hanya tinggal menjalankan teknisnya saja.

KPPBB kembali memberi penegasan dengan atas nama segenap golongan dan lapisan masyarakat Bangka Belitung menyatakan tuntutan:

1. Agar aspirasi masyarakat Bangka Belitung yang menuntut peningkatan status Daerah Bangka Belitung menjadi Provinsi dapat diterima dan disetujui oleh komisi II DPR RI
2. Berkenaan dengan masa tugas DPR RI Periode 1997-1999 segera berakhir, maka tuntutan ini dimohon dengan sangat dapat diagendakan dalam Sidang Komisi II DPR RI Periode 1999-2004 dan segera dijadikan sebuah ketetapan.

Pada tanggal 22 September 1999, Dewan Pemuda Bangka Belitung melalui surat No. 11/DPBB/IX/1999 mengeluarkan pernyataan sikap yang ditujukan kepada Menteri Perencanaan dan Energi di Jakarta yang isinya:

1. Bahwa sejak dilakukan pembangunan timah di Pulau Bangka dan Pulau Belitung sejak abad 17 hingga sekarang 300 tahun yang lalu baik oleh Belanda, Inggris, Kesultanan Palembang, maupun BUMN yang

sekarang ini oleh PT Timah Tbk, yang mana masyarakat di kedua pulau ini melihat pembangunan yang ada tidak seimbang dengan sumber daya alam yang telah dieksploitasi secara besar-besaran, habis-habisan dan sejalan dengan itu tingkat kesejahteraan sosial masyarakat di Bangka Belitung tidak maju secara pesat jika dibandingkan dengan jumlah timah yang telah dihasilkan dari kedua pulau ini.

2. Bahwa berdasarkan observasi secara empiris dapat dilihat terjadi kerusakan lingkungan alam baik di darat, di sungai, maupun di laut akibat penambangan timah antara lain kerusakan hutan yang telah hilang kelestariannya. Pendangkalan sungai yang ada di Bangka Belitung, dan rusaknya terumbu karang serta abrasi pantai yang signifikan di setiap pantai dimana PT. Timah melakukan penambangan yang menggunakan dredge (kapal keruk). Kerusakan kelestarian sumber daya alam tersebut dikhawatirkan telah memusnahkan beberapa plasma nultah yang ada di kedua pulau ini.

Untuk itu dengan rasa hormat Dewan Pemuda Bangka Belitung menghimbau kepada Pemerintah c.q. Departemen Pertambangan dan Energi segera mungkin mengambil langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas segala rasa hormat Dewan Pemuda Bangka Belitung dengan mendirikan Universitas Negeri di Bangka Belitung, yaitu Universitas Bangka Belitung.
2. Agar kerusakan pantai akibat abrasi ditanggulangi secepat mungkin dengan memasang kade pemecah ombak di beberapa pantai di kawasan wisata seperti Pantai Matras, Pantai Pasir Padi dan Sampur.
3. Meningat PT Timah Tbk adalah BUMN yang misinya selain profit oriented juga adalah sosial kiranya memberi/membagi sharing Pemerintah Pusat yang 65 persen masing-masing kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaen Bangka 10 persen, Pemerintah Daerah Tingkat II Pangkalpinang 10 persen dan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Belitung 10 persen sehingga sharing Pemerintah Pusat masih cukup besar yaitu 35 persen.
4. Sebagaimana ada di point 3 bahwa PT Yimah Tbk adalah salah satu BUMN yang misinya selain profit oriented adalah juga sosial oriented, kiranya dapat menyelesaikan konflik dengan manan karyawannya semata-mata tidak hanya dengan pendekatan hukum tetapi juga kiranya penyelesaian konflik melalui pendekatan sosial dan kesejahteraan.
5. Kiranya PT Timah Tbk proaktif berjuang bersama-sama masyarakat

Bangka Belitung memperjuangkan daerah ini untuk menjadi Wilayah Provinsi yang telah diperjuangkan masyarakat di kedua pulau ini sejak 43 tahun terhitung Tahun 1956 sehingga pada tahun 1970 atas usul inisiatif DPR-GR waktu itu telah ada RUU Pembentukan Provinsi Bangka Belitung dan telah dibahas di DPR-GR pada tahap pembicaraan peringkat III.

Selanjutnya, pada tanggal 22 September 1999 Ketua Komite Perjuangan Provinsi Bangka Belitung Rusman Rochiman dan Sekretaris Aswandi Ur di Jakarta melalui surat No: 006/KPB2-1/09/99 perihal Permohonan Penyampaian Aspirasi yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri mengirim surat yang isinya:

- Menindaklanjuti pertemuan masyarakat Bangka Belitung yang tergabung dalam Komite Perjuangan Provinsi Bangka Belitung di Jakarta dan Komite Perjuangan Provinsi Bangka Belitung di Bangka dan Belitung dengan Komisi II DPR RI.
- Selasa 21 September 1999, kami mohon untuk beraudiensi dengan Bapak. Dalam kesempatan itu kami ingin menyampaikan aspirasi masyarakat Bangka Belitung dan membahas tindak lanjut Pembentukan Provinsi Bangka Belitung.
- Kami mengusulkan waktu pertemuan pada Kamis, 23 September 1999, namun terserah pada kesediaan waktu Bapak. Selanjutnya, kami menunggu berita/konfirmasi dari Bapak.

Pada tanggal 8 Nopember 1999, KPPBB membuat laporan tertulis kepada tiga kepala daerah dan DPRD Kotamadya Pangkalpinang, Kabupaten Bangka dan Belitung tentang perkembangan perjuangan Povinsi Bangka Belitung. Dalam laporan tersebut memohon audiensi kepada ketiga Kepala Daerah, walaupun sampai saat ini Komite belum bertemu dengan Bupati Bangka dan Bupati Belitung, karena kesibukan Bupati tersebut.

Setelah menemui DPRD Kota Pangkalpinang, periode 1997-1999 dan DPRD Kabupaten Bangka Periode 1999-2004, bahkan DPRD Kota Pangkalpinang telah menerbitkan Surat Keputusan DPRD Kota Pangkalpinang No. 09 Tahun 1999 tanggal 26 Agustus 1999 tentang Persetujuan Terhadap Perjuangan Status Kepulauan Bangka Belitung menjadi Provinsi Bangka Beliuang. Selanjutnya, Komite mengharapkan hal yang sama seperti apa yang telah dikeluarkan oleh DPRD Kota Pangkalpinang.

Pada Tanggal 21 September 1999, KPPBB telah diundang mengikuti seminar sehari tentang Prospek dan Pilihan Antara Pemekaran Wilayah Kabupaten dan tuntutan menjadi Provinsi yang dilaksanakan oleh

Musyawarah Keluarga Masyarakat Bangka (MKMB) Jakarta.

Sementara itu, KPPBB sedang mempersiapkan feasibility study perjuangan Provinsi Bangka Belitung dan akan melaksanakan langkah-langkah kegiatan mempersiapkan dukungan politis dari DPRD ketiga daerah, guna diajukan ke Pemerintah Pusat, yang akan dijadwalkan selesai pada tahun 2000, untuk segera diserahkan ke Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Pada tanggal 21 Oktober 1999, KPPBB telah diterima oleh Komisi II DPR-RI Periode 1997-1999. Dengan hasil Komisi II DPR-RI telah merespon dan mendukung terbentuknya Provinsi Bangka Belitung dan akan mengagendakannya sebagai agenda Komisi II DPR periode 1999-2004.

Selanjutnya, secara formal KPPBB telah bertemu dan menyampaikan aspirasi rakyat Bangka Belitung kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Otonomi Daerah, Menteri Hukum dan Perundang-Undangan, Sekjen Depdagri. Dan, keseluruhan masyarakat telah memberikan dukungan moril secara pisitif. Begitu pula dengan KPPBB.

Pada tahapan perjuangan selanjutnya, langkah-langkah yang akan diambil KPPBB adalah:

- Memfokuskan kegiatan untuk mensosialisasikan Provinsi Bangka Belitung agar terbentuk persepsi yang sama dan untuk maksud tersebut, di programkan akan diselenggarakan seminar Perjuangan Provinsi Bangka Belitung, yang dijadwalkan pada akhir Nopember 1999, diikuti oleh ketiga daerah.
- Mengharapkan dukungan riil secara konsisten dan konsekuen aspirasi seluruh masyarakat Bangka Belitung, terutama dari para elit eksekutif dan legislatif agar organisasi perjuangan ini credible dan legitimate.
- Apabila potensi masyarakat telah terkonsolidasi, kemudian dukungan politis berupa SK DPRD ketiga daerah berikut proposal dengan rekomendasi dari para kepala daerah termasuk Provinsi Sumatera Selatan, suatu tim yang sudah legitimate dan credible tersebut, mengharap ke Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk secara formal menyampaikan tuntutan aspirasi masyarakat Bangka Belitung untuk menjadi Provinsi.

Sebagai bahan informasi dan pertimbangan kepada Dewan, berkenaan dengan ini kami sampaikan pula secara singkat sekelumit sejarah Perjuangan Provinsi Bangka Belitung sebagai berikut:

- Pada Tahun 1956 sudah dimulai gerakan memperjuangkan provinsi, tetapi karena belum kompak dan terkonsolidasi secara baik belum dapat disampaikan secara formal kepada Pemerintah.

- Pada Tahun 1966-1970 gerakan Perjuangan Provinsi Bangka Belitung diprakasai oleh DPRD Kabupaten Bangka, merupakan generasi kedua yang menamakan dirinya Presidium Provinsi Bangka Belitung dan secara gemilang telah berhasil mengantarkan perjuangan Provinsi Bangka Belitung dibahas sampai ke tingkat III Sidang DPR-GR surat itu sebagai usul Inisiatif DPR-GR dalam bentuk Rancangan Undang-Undang (RUU) Provinsi Bangka Belitung.
- Tahun 1999 merupakan generasi ke III yang menamakan dirinya Komite Perjuangan Provinsi Bangka Belitung yang dibentuk dari hasil Deklarasi Dewan Pemuda pada tanggal 18 Juni 1999 di Pangkalpinang, mempunyai strategi melanjutkan aspirasi masyarakat Bangka Belitung untuk menuntut provinsi yang telah dirintis oleh dua generasi sebelumnya, sehingga perjuangan Komite ini bukan euforia dan latak, tapi konsepsional dan murni aspirasi masyarakat Bangka Belitung yang telah diperjuangkan sejak 43 tahun yang lalu.

Pada tanggal 17 November 1999, KPPBB mengirimkan surat edaran ke berbagai Pimpinan Partai Politik, Ormas, Orsos, LSM, DPD II KNPI, serta OKP di Bangka Belitung. Surat itu berisi tentang permohonan dukungan politis atas aspirasi perjuangan menuntut terbentuknya Provinsi Bangka Belitung. Dan, isinya antara lain :

1. Latar Belakang

- a. Dibidang pemerintahan diantara lima Keresidenan di Sumatera Bagian Selatan, hanya Keresidenan Bangka Belitung yang belum menjadi Provinsi sedangkan empat Keresidenan, yaitu Lampung, Jambi, Bengkulu, Palembang, kesemuanya telah menjadi provinsi.
- b. Dibidang sosial kultural Bangka Belitung berbeda dengan Sumatera Bagian Selatan, mulai dari pembagian hukum adat, yaitu Bangka Belitung salah satu dari 19 adat reeh yang ditetapkan oleh Prof Van Vollen Hoven sehingga hukum adatnya, bahasanya, karakternya, keseniannya jauh berbeda karena diakibatkan perbedaan homogenitas yang berazaskan geneologis di Sumatera Selatan dengan heterogenitas yang berazaskan territorial bagi masyarakat Bangka Belitung.

Secara historis, sejak jaman penjajahan Belanda dan zaman federal sudah dipelopori seperti rencana terbentuknya Babiri (Bangka Belitung Riau) setelah kemudian dilanjutkan oleh generasi pertama tahun 1956, generasi kedua tahun 1966-1970 (Presidium Bangka Belitung) dan generasi ketiga

tahun 1999 (Komite Perjuangan Provinsi Bangka Belitung).

2. Langkah yang telah ditempuh :

Setelah terbentuk wadah perjuangan yang dinamakan Komite Perjuangan Provinsi Bangka Belitung terbentuk dari hasil deklarasi Dewan Pemuda Bangka Belitung pada tanggal 18 Juni 1999 di Pangkalpinang, Komite aktif melakukan kegiatan antara lain :

- a. Telah mendapat dukungan politis berupa SK Dewan tentang Persetujuan terhadap Perjuangan Status Kepulauan Bangka Belitung menjadi Provinsi Bangka Belitung dari DPRD kota Pangkalpinang dan Insya Allah akan menyusul dukungan yang sama dari DPRD Kabupaten Bangka dan Belitung.
- b. Pada tanggal 21 September 1999 Komite telah mengikuti seminar sehari berjudul Prospek dan pilihan antara pemekaran Kabupaten dan tuntutan menjadi Provinsi yang diselenggarakan oleh Musyawarah Keluarga Masyarakat Bangka (MKMB) Jakarta bertempat di Hotel Century Park Senayan Jakarta, dengan hasil diantaranya telah dibentuk Komite Perjuangan Provinsi Babel Jakarta berkantor di Jalan Dempo 1 No. 76 Jakarta.
- c. Komite telah mempersiapkan Proposal tentang Provinsi Bangka Belitung dalam dua versi, yaitu versi Departemen Dalam Negeri dan versi Konsultan untuk dipromosikan kepada para Investor. Pada tanggal 21 Oktober 1999, Komite telah diterima oleh Komisi II DPR, secara informal Komite telah bertemu dan menyampaikan aspirasi rakyat Bangka Belitung kepada Mendagri, Menteri Hukum dan Perundang-Undangan, Menteri Otonomi Daerah.

3. Langkah-langkah yang diprogramkan selanjutnya :

- a. Memfokuskan kegiatan untuk mensosialisasikan Provinsi Bangka Belitung agar terbentuk persepsi yang sama untuk maksud tersebut, di programkan akan diselenggarakan Seminar Perjuangan Provinsi Bangka Belitung yang dijadwalkan pada akhir Desember 1999. Diikuti oleh ketiga daerah.
- b. Mengharapkan dukungan riil secara konsisten dan konsekuen sebagai wujud aspirasi seluruh masyarakat Bangka Belitung terutama dari elit politik, eksekutif dan legislatif agar organisasi perjuangan ini credible dan legitimate.

- c. Apabilapotensi masyarakat telah terkonsolidasi, kemudian dukungan politis berupa SK DPRD ketiga daerah berikut proposal dengan rekomendasi dari ketiga Kepala Daerah termasuk Provinsi Sumatera Selatan, diperoleh suatu Tim yang sudah *legitimate* dan *credible* tersebut, menghadap ke Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk secara formal menyampaikan tuntutan aspirasi masyarakat Bangka Belitung menjadi Provinsi.

Pada malam di awal November 1999, beberapa tokoh masyarakat Belitung mengadakan pertemuan di rumah Edi Siahaya di Tanjungpandan untuk membahas pembentukan Komite Perjuangan Provinsi Bangka Belitung. Pada hari itu juga dibentuk panitia persiapan membentuk komite yang di ketuai oleh M. Nasir AB dengan sekretaris Suherman. Dua hari berikutnya, di ruang lobi DPRD Kabupaten Belitung pada pukul 20.00 WIB, dibentuklah KPPBB yang kemudian terpilih sebagai ketua M. Nasir AB dengan sekretaris Drs. H. Ardi Soma dan bendahara H. Samsudin Basari. KPPBB Belitung mulai efektif bekerja pada 8 November 1999 yaitu membahas rencana kerjanya, pendanaan, maupun pembentukan pokja-pokja.

Guna memantapkan semangat dan rencana kerja, maka pada tanggal 6 Desember 1999 KPPBB Belitung dan KPPBB Kotamadya Pangkalpinang mengadakan pertemuan di ruang ketua kerja Ketua DPRD Kabupaten Belitung pada pukul 10.00 WIB. Hasilnya DPRD Kabupaten Belitung setuju dengan rencana pembentukan Provinsi Bangka Belitung. Dan, keesokan harinya kedua unsur komite tersebut menemui Bupati Belitung di ruang rapat Setda Kabupaten Belitung pada pukul 12.00 WIB. Bupati Belitung setuju dan mendukung rencana pembentukan Provinsi Bangka Belitung.

Beberapa hari setelah komite terbentuk, gema membentuk Provinsi itu seakan lenyap, sementara di Pangkalpinang sudah sangat demikian menggema. Gerakan komite yang seakan vakum itu memang tidak didukung oleh unsur yang lebih luas, karena keanggotaan anggota komite masih dari kalangan masyarakat terbatas. Apalagi pembentukan komite pada saat itu dalam situasi bulan Ramadhan sehingga gerakan tidak bisa dilaksanakan dengan begitu cepat.

Melihat kevakuman dan kebekuan tersebut, maka Drs. Arham Armuza, aktif melakukan pembicaraan dengan para tokoh di kalangan masyarakat maupun tokoh-tokoh pemuda di KNPI, guna membangun kembali semangat pembentukan Provinsi Bangka Belitung. Karena dapat dikatakan, pada saat itu masyarakat Belitung belumlah bisa menerima atau menyetujui dengan bulat

ajakan pembentukan Provinsi Bangka Belitung, bahkan termasuk keberadaan komite itu sendiri.

Munurut H. Yahya Yakob (Tokoh Presidium PPB tahun 19668) mengapa terkesan seperti itu, seolah Belitung tidak begitu antusias dengan perjuangan pembentukan Provinsi tersebut, bahkan seakan keberatan jika provinsi terbentuk, itu dikarenakan beberapa kalangan di Belitung beranggapan bahwa pembentukan Provinsi Bangka Belitung secara politis tetap tidak akan membawa keuntungan yang berarti bagi Belitung.

Hal tersebut dilatarbelakangi pertimbangan dan hitung-hitungan politik, dimana kondisi Belitung, dari segi luas wilayah dan jumlah penduduk lebih sedikit dari Bangka ataupun Pangkalpinang sehingga komposisi kekuatan di legislatif maupun di pemerintahan pada nantinya tentu tidak berimbang dan itu amat menentukan kebijakan publik dalam membangun Bangka Belitung dan tetap saja akan membuat Belitung tertinggal dengan daerah yang ada di Bangka.

Yang menjadi bahan pertimbangan mendasar dan mesti dibahas secara seksama, maka kalangan unsur masyarakat dan para tokoh pemuda khususnya KNPI Belitung, mencanangkan opsi dan persyaratan yang mesti diperjuangkan apabila Provinsi Bangka Belitung harus terbentuk.

Masyarakat Belitung tidak seharusnya menerima ajakan tersebut begitu saja, jangan seperti menerima sebuah cek kosong karena semua itu akan dituntut pertanggungjawaban moral oleh generasi mendatang. Apalagi Belitung memegang peran kunci sebagai syarat terbentuknya Provinsi Bangka Belitung karena tanpa kesertaan Belitung Provinsi takkan terbentuk. Pemikiran itu mengkristal pada pertemuan di DPD KNPI Belitung pada tanggal 8 Desember 1999.

Padat tanggal 17 Desember 1999, Ketua DPRD Kota Pangkalpinang Badaruddin Usman, Wakil Ketua Sri Rezeki, Drs. Malikul Amdjad, Drs. H. Kaharuddin Alwi dan Ketua Fraksi Partai Golkar Alfian Helmi, Fraksi AKBK Zulfandi A. Rani, Fraksi PDI-P Kusniati Achyar, Fraksi Persatuan Pembangunan Drs. Zakaria Ismail, Wakil Ketua Fraksi TNI-Polri Arif Priyanto melalui surat No: 29 tahun 1999 mengeluarkan Memorandum DPRD Kota Pangkalpinang tentang Perjuangan Kepulauan Bangka Belitung menjadi Provinsi Bangka Belitung yang isinya :

1. Mengusulkan dan menyetujui terlaksananya Pembentukan Provinsi Bangka Belitung.
2. Dengan hormat melalui Bapak Presiden Republik Indonesia

kepada Pimpinan DPR-RI untuk dapat segera menerbitkan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Bangka Belitung dimaksud.

Kemudian pada tanggal 29 Desember 1999 DPRD Kabupaten Bangka melalui surat No. 163 tahun 1999 mengeluarkan Memorandum tentang Perjuangan Pembentukan Provinsi Bangka Belitung yang berisi :

- DPRD Kabupaten Bangka setelah memperhatikan hasil pertemuan antara Perjuangan Provinsi Bangka Belitung dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan Kabupaten Bangka pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 1999 dengan ini menyatakan : Mendukung sepenuhnya upaya Perjuangan Pembentukan Provinsi Bangka Belitung.

Selanjutnya, pada tanggal 12 Januari 2000 Ketua Komite Perjuangan Provinsi Bangka Belitung Rusman Rochiman dan sekretaris Aswandi Ur di Jakarta melalui surat No. 001/KPP-BB/I/2000 mengeluarkan surat undangan yang isinya:

“menindaklanjuti Memorandum DPRD Kota Pangkalpinang, Nomor : 29 tahun 1999 tanggal 17 Desember 1999. Memorandum DPRD Kabupaten Bangka Nomor : 163 tahun 1999 tanggal 29 Desember 1999, dan Memorandum DPRD Kabupaten Belitung tanggal 13 Januari 2000, tentang Dukungan Terhadap Perjuangan Provinsi Bangka Belitung, dengan ini Komite Perjuangan Provinsi Bangka Belitung mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk menghadiri dan berperan serta dalam pertemuan yang akan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2000 di Wisma DPR RI Kopo Bogor”.

Acara pertemuan itu diadakan adalah untuk pembentukan kesepakatan bersama antara semua unsur yang terkait dalam Perjuangan Provinsi Bangka Belitung dan menetapkan langkah kerja dalam realisasi Provinsi Bangka Belitung.

Pada tanggal 13 Januari 2000 melalui surat No: 208 Tahun 2000 DPRD Kabupaten Belitung mengeluarkan Memorandum tentang rencana pembentukan Provinsi Bangka Belitung yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Belitung Anwar DM, Wakil Ketua Rustam Effendi, H. Abubakar Hamid, H. Iswarin Yusuf Said dan Ketua Fraksi Partai Bulan Bintang Masri Sadeli, PDI- P Fadlia, Partai Golkar Muchsin Mukti BA, Amanat Persatuan Bangsa Suryanto Sudibya, sekretaris Fraksi TNI/Polri K. Asmuji yang isinya mendukung dan menyetujui Pembentukan Provinsi Bangka Belitung dan mengusulkan melalui Bapak Presiden Republik

Indonesia dan DPR RI untuk dapat mereralisasikan dan menerbitkan Undang-undang tentang Pembentukan Provinsi Bangka Belitung.

Pada tanggal 17 Januari 2000, ketiga Pimpinan Dewan, yakni DPRD Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka dan DPRD Kabupaten Belitung mengeluarkan Deklarasi Pembentukan Provinsi Bangka Belitung yang ditandatangani Ketua DPRD Kota Pangkalpinang Badaruddin Usman, Wakil Ketua Sri Rezeki, Drs. Malikul Amdjad, Drs. H. Kaharuddin Alwi, Ketua DPRD Kabupaten Bangka Riswan Hayadin, Wakil Ketua, H. Syamsumin Sagaf, SH, Osfindinar Yusroni Yazid, Ketua DPRD Kabupaten Belitung Anwar DM, Wakil Ketua Rustam Effendi, H. Abubakar Hamid, H. Iswarin Yusuf Said yang berisi :

Untuk menyelenggarakan Pembangunan Nasional dan melaksanakan pemerintahan daerah di dalam ruang lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan ini menyatakan : Pembentukan Provinsi Bangka Belitung perlu segera diwujudkan.

Awal Januari 2000, pusat kegiatan strategi dan Perjuangan Pembentukan Provinsi Bangka Belitung dipindahkan ke Jakarta. Pertimbangan perpindahan ini karena dianggap urusan di daerah untuk sementara telah rampung dengan didapatkannya tiga memorandum dari DPRD tiga daerah. Maka perjuangan selanjutnya difokuskan pada pertimbangan taktis dan teknis pada tataran Pemerintah Pusat. Dengan berbagai cara seperti penyampaian proposal, aspirasi, dan lobi-lobi yang intensif, baik kepada pihak eksekutif yaitu Departemen Dalam Negeri serta pihak legislatif yaitu DPR.

Langkah berikutnya untuk menindaklanjuti tiga memorandum DPRD Kota Pangkalpinang No. 29 tahun 1999 tanggal 17 Desember 1999, DPRD Kabupaten Bangka No. 163 tahun 1999 tanggal 29 Desember 1999, dan memorandum DPRD Kabupaten Belitung No. 208 tahun 2000 tanggal 13 Januari 2000, tentang Pembentukan Provinsi Bangka Belitung, maka Komite Perjuangan Provinsi Bangka Belitung Jakarta, mengeluarkan undangan tertanggal 12 Januari 2000 dengan No. 001/KPP-BB/I/2000. Isi undangan adalah pertemuan pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2000 di Wisma DPR RI Kopo Bogor, dengan cara :

- Pembentukan kesepakatan bersama antara semua unsur yang terkait dalam perjuangan Provinsi Bangka Belitung.
- Menetapkan langkah kerja dalam realisasi Provinsi Bangka Belitung.

Pada tanggal 23 Januari 2000, diadakan rapat tertutup selama satu jam

lebih di wisma DPR RI Kopo Bogor. Rapat tersebut di pimpin oleh Badaruddin Usman (Ketua DPRD Kota Pangkalpinang), Yusroni Yazid (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangka) dan H. Anwar, DM (Ketua DPRD Kabupaten Belitung) serta Drs. Rusman Rochiman (KPPBB Jakarta) memilih tujuh ketua Presidium Pembentukan Provinsi Bangka Belitung yaitu: Yusroni Yazid, Syamsumin Sagap, SH (Kabupaten Bangka), Drs. H. Kaharuddin Alwi, Drs. A. Hudarni Rani SH (Kota Pangkalpinang), Rustam Effendi BSc, Drs. Arham Armuza (Kabupaten Belitung), dan Rusman Rochiman (Jakarta). Untuk posisi sekretaris, bendahara dan bidang-bidang lainnya belum diumumkan secara resmi dan akan disusun oleh pengurus inti presidium.

Tujuh personel Ketua Presidium sesuai dengan kesepakatan yang diputuskan dalam pertemuan antara Pimpinan dan Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang pada 17 Januari 2000 di DPRD Pangkalpinang menyepakati unsur ketua masing-masing dua orang dari Kabupaten Belitung, Bangka dan Pangkalpinang serta dari KPPBB Jakarta. Dan, tugas Presidium menyusun sebuah studi, visi dan misi sehingga menggambarkan pembangunan regional Bangka Belitung. Studi ini nantinya menjadi bahan pertimbangan bagi terbentuknya Provinsi Bangka Belitung.

Pada tanggal 24 Januari 2000, Presidium Pembentukan Provinsi Bangka Belitung mengadakan pertemuan di ruang kerja Ir. Darmansyah Husein di Gedung DPR RI lantai 21 membahas kesepakatan tiga daerah. Isi kesepakatan tersebut terdiri dari empat point yaitu:

1. Kesiediaan dan tanggungjawab mewujudkan saling ketergantungan (interdependensi) dan saling menguntungkan bagi ketiga daerah, Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung dan Kota Pangkalpinang dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.
2. Kesiediaan dan tanggungjawab mewujudkan keseimbangan dan kesetaraan dalam kemajuan tiga daerah.
3. Setiap pengambilan keputusan, kebijakan dan pemecahan masalah yang menyangkut hajat dan kepentingan mendasar bagi ketiga daerah dan penduduknya selalu mengutamakan dan dijiwai semangat persaudaraan dan kekeluargaan.
4. Hal-hal yang menyangkut opsi atau persyaratan akan dibicarakan lebih lanjut denngan dijiwai oleh point 1,2,dan 3.

Kesepakatan tersebut merupakan amanat untuk dijadikan landasan moral bagi Pemerintah Provinsi Bangka Belitung yang harus dipertanggungjawabkan oleh penyelenggara Pemerintahan Provinsi Bangka

Belitung dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung. Kesepakatan itu dikeluarkan pada hari itu juga dan ditandatangani oleh ketujuh ketua Presidium Perjuangan Provinsi Bangka Belitung. Selanjutnya, pada tanggal 26 Januari 2000 Presidium Perjuangan Pembentukan Provinsi Bangka Belitung, mengadakan pertemuan dengan Komisi II DPR RI Bagian Hukum dan Pemerintahan Dalam Negeri. Yang hadir pada saat itu adalah Sidarto dari Fraksi PDI-P, John, Fadli Tomon, Idrus Marhan dari Fraksi Golkar, Syaiful dari Fraksi PPP, Paiman dari Fraksi TNI/Polri, Mutamin dari Fraksi Reformasi (PAN & Partai Keadilan).

Pertemuan dengan komisi tersebut merupakan pertemuan yang kedua setelah pertemuan pertama dengan Komisi II DPR RI di era Presiden BJ Habibie pada tanggal 21 September 1999. Pada pertemuan pertama dilaksanakan oleh Komite Perjuangan Pembentukan Provinsi Bangka Belitung. Sedangkan pertemuan kedua dilakukan oleh Presidium pada era Presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Inti pertemuan menyampaikan memorandum dan Deklarasi Masyarakat Bangka Belitung menuntut terbentuknya Provinsi Bangka Belitung. Akan tetapi pembentukan sebuah Provinsi itu tentu memerlukan waktu, dan secara politis tidak menjadi masalah lagi tetapi perlu pengkajian lebih lanjut mengenai sosial dan ekonomi.

Seperti pertemuan sebelumnya, pada dasarnya Komisi II DPR RI menerima dengan baik, terlebih bahwa Bangka Belitung mau jadi provinsi bukan merupakan ikut-ikutan atau euforia, tetapi sudah diperjuangkan sejak tahun 1956 dan Komisi II siap untuk menindaklanjutinya. Selanjutnya Komisi II akan mengadakan rapat pada tanggal 8 Februari 2000 dengan Menteri Dalam Negeri dan dengan Menteri Negara Otonomi Daerah pada tanggal 10 Februari 2000, serta akan mengevaluasikan sejauh mana perkembangannya.

Pada tanggal 5 Februari 2000, bertempat di Wisma Pertamina Cibogo Bogor Presidium Pembentukan Provinsi Bangka Belitung mengadakan pertemuan, rapat anggota untuk membentuk Kelompok Kerja (Pokja) berikut dengan program kerjanya.

Dalam rapat tersebut menghasilkan beberapa keputusan dan kesepakatan antara lain:

I. Ketua Pokja

Anggota Pokja

- Drs. Achmad Rusdi
- Drs. Ali Asgar

: Rusman Roehiman

:

- Ir. Sutedjo Sujitno
- Abang Husni Effendi

- H Mashud Achmad
- Usmandie Andeska
- Husaini Is, SH
- Ir Amirudin Said, M.Se
- Zulkarnaen Hasan
- Safari ANS
- Ir. Hardi Afriansyah, M.Si
- Azhar Romli
- Rusli Sarmili

II. Disepakati bahwa dari anggota kelompok kerja ini terbagi dalam tiga bidang kelompok kerja yaitu:

1. Kelompok Kerja Bidang Dana
 2. Kelompok Kerja Bidang Program Kerja
 3. Kelompok Kerja Bidang Evaluasi
- (Khusus point 3 Bidang Evaluasi meliputi kemajuan dan kekurangan yang dicapai, sosialisasi, dan litbang dari Presidium).

III. Disepakati bahwa anggota/nama yang masuk ke dalam masing-masing bidang adalah:

1. Bidang Program Kerja
 - Drs. Achmad Rusdi
 - Ir. Amirudin aid, MSe
2. Bidang Pendanaan
 - Abang Husni Effendi
 - Drs. Ali Asgar
3. Bidang Evaluasi
 - Ir. Sutedjo Sujitno
 - H. Zulkarnain Hasan
 - Usmadie Andeksa

4. Kesekretariatan Pokja

Untuk Kesekretariatan Pokja ini ditunjuk Ir. Hardi Afriansyah M.Si

IV. Menyusun program kerja untuk masing-masing bidang yaitu:

1. Bidang Program Kerja
 - a. Membuat/mengadakan persiapan untuk ke Provinsi sesuai/berdasarkan hasil dari tim *expand group* ke Palembang untuk mempelajari situasi dan persiapan untuk dialog
 - b. Selain itu usul inisiatif akan dilakukan, jika terjadinya penolakan
 - c. Secara resmi tetap akan disampaikan mengenai ikrar, proposal, deklarasi, dan memorandum.
 - d. Melaksanakan sosialisasi dan membina opini masyarakat di Bangka Belitung sampai ke tingkat Desa.
 - e. Secara Kontinue memantau dan memberikan masukan ke

Direktorat Otonomi Daerah (DOD).

- f. Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif
- g. Untuk jangka panjang disesuaikan Program Kerja Presidium

2. Bidang Pendanaan

- a. Untuk sumber dana diharapkan dari anggaran DPRD (Pemda), swasta dan pengusaha
- b. Jangka pendek mengadakan pendekatan ke PT. Timah Tbk untuk bantuan dana.
- c. Mengadakan *coffee, morning* atau *party* dengan pengusaha atau melalui seminar mengenai Bangka Belitung dalam rangka mencari dana.
- d. Segera membuka rekening Presidium Pembentukan dan Provinsi Bangka Belitung.
- e. Untuk mencari dana berdasarkan wilayah di daerah maupun di Jakarta serta penggunaan anggaran melalui suatu petunjuk pelaksanaan (Juklak) akan dibicarakan pada pertemuan berikut.

3. Bidang Evaluasi

- a. Membuat *executive summary*
- b. Melakukan sosialisasi melalui pembuatan baju kaos atau stiker
- c. Membuat kronik/sosialisasi mengenai masalah-masalah kemajuan dari Presidium.
- d. Mereview proposal Propinsi Bangka Belitung dari bentuk studi objektif ke bentuk studi prfektif

V. Sedangkan untuk Pokja di Jakarta sebanyak 10 orang yaitu Drs. Achmad Rusdi, Ir. Sutedjo Sujitno, Drs Ali Asgar, Abang Husni Effendi, H. Mashud Achmad, Safari ANS, Usmandie Andeska, Ir. Hardi Afriansyah, M.Si, H. Husaini Is, SH. Ir Azhar Romli.

Selanjutnya, pada tanggal 8 Februari 2000 bertempat di KFC Basement Blok M Jakarta Selatan. Presidium mengadakan rapat untuk mengambil langkah-langkah strategis ke depan dan beberapa keputusan yang disepakati dalam pertemuan Pengurus Presidium. Dalam menyusun program kerjanya, Pengurus Presidium melakukan :

1. Coffe Morning

Melaksanakan kegiatan *coffee morning* sebagai upaya mengadakan pendekatan dan pencarian dana melalui *coffee morning* dengan pengusaha dan PT Timah Tbk. Yang dihadiri oleh: Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH, Erry

Riyana Harja Pamekas, Ir. Sutedjo, Drs. Rusman Rochim, Ir. Darmansyah Husein (menghubungi Erry Riyana HP) Husni. Disamping itu, juga dilakukan melalui kegiatan *dinner party*.

2. **Menghadap Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Gubernur dan PRD Sumatera Selatan).**
3. **Melaksanakan kegiatan audiensi dengan MPR dan DPR RI.**
Untuk itu perlu persiapan bahan mengenai:
 - Memorandum/deklarasi
 - RUU (dengan usulan pemekaran wilayah dan batas wilayah dan setelah disepakati bersama)
 - Proposal
4. **Melaksanakan Rapat Pleno (Menunggu surat jawaban dari Presidium di ketiga daerah)**
5. **Melaksanakan Seminar Provinsi Bangka Belitung Tujuannya adalah:**
 - Untuk publik opini dan legitimasi
 - Agar masyarakat secara bersama menyatakan pendapat dan setuju, baik dari segi sosialisasi maupun strategi dan historis, serta pemerintahan.
 - Memaparkan proposal perspektif (Bangka Belitung ke masa depan).
6. **Membuat Kronik**
7. **Membuat folder/perspektif/hand out**
8. **Melakukan penyempurnaan mengenai data-data untuk penyusunan proposal perpektif**
9. **Mengadakan road show**
10. **Audiensi dengan Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra, SH untuk koordinasi dan konsultasi.**

Pada tanggal 17 Pebruari 2000, delegasi presidium yang terdiri dari sepepuh presidium, para tokoh masyarakat, Pimpinan DPRD tiga daerah, menemui DPRD Sumatera Selatan H. Rosihan Arsyad guna meminta dukungan. Namun Gubernur menolak aspirasi atau keinginan masyarakat Bangka Belitung begitupun ketika menerima delegasi Pansus DPR RI.

Berikutnya, pada tanggal 21 Februari 2000 bertempat di Gedung Mustika Ratu Jakarta Selatan. Presidium Pembentukan Provinsi Bangka Belitung mengadakan rapat dengan materi rencana kegiatan/program kerja dari Presidium Pembentukan Provinsi Bangka-Belitung di Jakarta, menyepakati beberapa kesimpulan yaitu:

1. Melaksanakan rapat pengurus ini dengan mengundang pengurus inti (Jakarta, Belitung, Bangka dan Pangkalpinang) pada tanggal 4 Maret 2000. Agenda rapat yaitu:
 - a. Koordinasi/konsolidasi organisasi
 - b. Mekanisme kerja/manajemen
 - c. Agenda kerja
2. Melaksanakan rapat/sidang pleno pengurus Jakarta pada tanggal 5 Maret 2000, dengan agenda mensosialisasikan/membahas hasil rapat inti.
3. Melaksanakan seminar pada tanggal 6 Maret 2000 dengan tema Konsep Pembangunan Provinsi Bangka Belitung dan sebagai pembicara ahli ekonomi
4. Menyetujui bahwa Kelompok Kerja Bidang Studi Prospektif (Pokja) opini merupakan bagian dari Presidium Jakarta
5. Menyelesaikan/mengadakan tempat untuk sekretariat sampai akhir bulan Februari 2000
6. Mencari dana talangan untuk sekretariat dalam waktu dekat.

Untuk merealisasikan semua agenda yang telah di putuskan dalam rapat pada tanggal 21 Pebruari 2000 tersebut, maka pada tanggal 23 Pebruari 2000 di KFC Blok M Jakarta Selatan diadakan pertemuan untuk membicarakan masalah anggaran guna pelaksanaan rapat pleno dan seminar tersebut.

Tanggal 26 Februari 2000 di rumah Yusril Inza Mahendra diadakan pertemuan untuk membicarakan:

- Dari segi Pemerintahan yang sudah disetujui oleh Ryas Rastid yaitu Madura, Banten, Riau dan Bangka Belitung dan sekitarnya bulan Maret dan April akan diajukan RUU
- Rancangan usul inisiatif dijalankan bila DPRD Sumatera Selatan dan Gubernur tidak setuju
- Gubernur tidak mengeluarkan rekomendasi tetapi hanya surat pengantar. Menurut Yusril, lebih baik menunggu rekomendasi saja dari Gubenur, jika dalam batas waktu tertentu Gubernur tidak mengeluarkan, baru dilaksanakan usulan inisiatif.

Pada tanggal 4 sampai 9 Maret 2000, Pokja atau kelompok kerja Komunikasi Politik, yang lebih dikenal dengan sebutan **“Pokja Bedepeng”** yang diketahui oleh Emron Pangkapi. Kelompok ini bergerak dengan cepat, dalam melobi anggota DPR RI guna mengumpulkan sejumlah tandatangan yang sudah terkumpul 80 lebih tandatangan. Dukungan untuk percepatan

langkah menuju terbentuknya Provinsi, sehingga mekanisme pengajuan rancangan undang-undang dapat diproses melalui usul inisiatif DPR.

Setelah Presidium Pembentukan Provinsi Bangka Belitung mengadakan pertemuan dengan Komisi II DPR RI pada tanggal 26 Januari 2000, maka pada tanggal 8 Maret 2000 Gubernur Sumatera Selatan Rosihan Arsyad dan DPRD Sumatera Selatan yang diwakili oleh Zamzami Achmad dari Praksi Golkar di Undang DPR RI untuk didengar pendapatnya tentang pembentukan Provinsi Bangka Belitung.

Komisi II DPR RI mendesak Gubernur Sumatera Selatan dari DPRD Sumatera Selatan untuk mengabdikan keinginan masyarakat Bangka Belitung menjadi Provinsi. Rapat dengan pendapat umum ketika itu dipimpin oleh wakil Ketua Komisi II Ferry Mursida Baldan. Sementara itu, Rudy Zein dari Fraksi Pantai Golkar mengharap agar Gubernur Rosihan Arsyad menjadi idan yang baik dalam melahirkan Provinsi Bangka Belitung ini. Sebagaimana pernah dilakukan oleh Gubernur Asnawie Mangkualam saat melahirkan Provinsi Bengkulu.

Sedangkan anggota Komisi II DPR RI PFP, Ali Marwan Hanar mengatakan bahwa masyarakat Bangka Belitung sudah cukup siap, sebab rencana Pembentukan Provinsi Bangka Belitung sudah dihembuskan sejak tahun 1971. Dan, Laode Djeni Hasmar dari Fraksi Partai Golkar mengingatkan Gubernur Rosihan Arsyad untuk tidak main-main dengan aspirasi masyarakat. Sebab belajar dari pengalaman Orde Baru yang sudah bertahan 32 tahun, kemudian runtuh lantaran desakan aspirasi rakyat.

Menanggapi desakan anggota DPR RI itu, Gubernur Rosihan Arsyad menegaskan bahwa pihaknya tidak ada maksud untuk menghambat aspirasi masyarakat Bangka Belitung dan Rosihan Arsyad mengatakan dirinya akan berada pada posisi yang paling depan untuk mendukung aspirasi ini, asal itu prosedural dan benar-benar aspirasi rakyat setempat.

Pada tanggal 6 Maret 2000, Presidium Pembentukan Provinsi Bangka Belitung melalui surat No. 016/Press-BB/Jkt/III/2000 di Jakarta mengadakan seminar dengan tema Provinsi Bangka Belitung **“Mewujudkan Pembangunan Mandiri”**. Seminar dilaksanakan pada tanggal 12 Maret di Hotel Ria Diani Cibogo Bogor. Kesimpulan seminar antara lain:

1. Dari tinjauan sejarah, budaya, sosial Bangka Belitung dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa Bangka Belitung memiliki adanya satu kesatuan kultur dan budaya, kesamaan sosiologis sumberdaya alam, kesatuan bentang, alam dan kesatuan geologis, yang berbeda dari

- daratan Sumatera.
- b. Dalam perkembangan sejarahnya, ternyata telah terjadi suatu perkembangan dimana daerah Bangka Belitung yang merupakan suatu keresidenan yang lain berhubung menjadi perairan. Sejarah membuktikannya bahwa sesungguhnya daerah Bangka Belitung merupakan daerah berdiri sendiri (sebelum abad 17).
 - c. Jumlah penduduk Bangka Belitung dengan kualifikasi yang ada sekarang merupakan suatu fakta yang sangat menunjang bagi pembangunan wilayah Bangka Belitung menjadi Provinsi.
2. Tinjauan dari segi potensi SDA
- a. Adanya UU No. 22 tahun 1999 memberi peluang yang sangat besar bagi pemekaran dan terbentuknya Provinsi Bangka Belitung
 - b. Potensi ekonomi yang termanifestasi melalui PAD sangat mendukung bagi pembiayaan pembangunan Bangka Belitung. Pada posisi sekarang PAD sekitar Rp. 49 Milyar dan dapat dikembangkan menjadi Rp. 350 Milyar dalam waktu 5 tahun setelah terbentuknya Provinsi Bangka Belitung. Dari struktur pendanaan PAD, maka terlihat adanya optimisme bagi Provinsi Bangka Belitung untuk membiayai pembangunan daerah oleh pemerintah.
3. Bangka Belitung dilihat dari posisi geografisnya memiliki posisi yang strategis dan ekonomis bagi pengembangan ekonomi ke depan yaitu bagi:
- a. Pembangunan Bangka Belitung sebagai industri maritim (*container port, maintenance* kapal tanker, industri galangan kapal).
 - b. Industri pengolahan hasil perikanan dan pertanian.
 - c. Industri pariwisata.
 - d. *Regional service* yaitu pusat logistik Nasional untuk tiga pulau besar Sumatera, Jawa dan Kalimantan.
 - e. Pembangunan potensi ekonomi tersebut akan memberi multi-plier efek bagi peningkatan kemampuan daerah selanjutnya untuk lebih mandiri.
 - f. Arah pembangunan Bangka Belitung akan dititik beratkan pada pengembangan keunggulan komprehensif pada

bidang-bidang yang memiliki keunggulan kompetitive dengan berbasis *high volume added (industry)*.

Pada tanggal 11 Maret 2000 diadakan pertemuan rapat inti dan pleno dengan hasil:

1. Pandangan Umum

Pada pandangan umum baik dari beberapa penasehat maupun pengurus adalah menekankan pada:

- a. Sistem/mekanisme kerja antara empat daerah, Jakarta, Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung serta Kota Pangkalpinang harus diatur/dirumuskan sehingga tidak terjadinya over lapping antara satu dengan yang lainnya. Mekanisme ini menyangkut mekanisme kerja/program kerja, kesekretariatan maupun sistem pendanaan. Kesemuanya ini perlu dibicarakan dan disepakati
- b. Untuk kelancaran komunikasi maupun informasi baik antara Presidium yang berada di daerah dengan Jakarta maupun dengan anggota-anggota dewan dan pemerintahan, maka sangat diperlukan sekretariat yang tetap di Jakarta.
- c. Masalah dana selain perlu dibicarakan dan disepakati antara ke empat daerah, juga sumber-sumber yang ada selain APBD. Secara tektis untuk pendanaan ini dapat diambil secara taktis dari anggaran lain di daerah.
- d. Perlunya dibuat *schedule/jadwal* kerja, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, serta perlunya memanfaatkan media yang ada untuk publik opini dan secara teknis perlu segera dilaksanakan untuk yang lebih prioritas.
- e. Untuk pemekaran kabupaten tetap diajukan bersama dengan pemekaran Provinsi, tetapi pemekaran ini perlu rekomendasi dari DPRD

2. Laporan Kemajaun

a. Presidium Jakarta

Presidium Jakarta telah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka untuk menjadikan Bangka Belitung menjadi Provinsi yaitu;

- Melakukan loby-loby/pendekatan dengan anggota-anggota dewan baik dalam usulan inisiatif maupun tidak.
- Menyampaikan laporan-laporan dan menyerahkan *summary* dan proposal obyektif pembangunan Bangka Belitung baik kepada fraksi-fraksi maupun Pemerintah Pusat (Dewan Otonomi

Daerah).

- Melakukan pertemuan-pertemuan dengan Komisi II dan Sub Komisi II bagian Pemerintah Daerah.
- Melakukan pertemuan-pertemuan dengan fraksi-fraksi.

b. Presidium Kabupaten Bangka

Beberapa kegiatan/langkah yang sudah dilaksanakan oleh Presidium Kabupaten Bangka yaitu:

- Sosialisasi di desa-desa melalui spanduk dan baliho-baliho.
- Mengusahakan dana melalui pos bantuan untuk Presidium, tetapi tetap dipegang oleh kas daerah dan ini hanya untuk membantu penyusunan kelayakan dan proposal-proposal.
- Mengusulkan untuk melakukan kegiatan Presidium ini, setiap daerah bergerak sesuai dengan kebutuhan masing-masing, tetapi sekali-sekali ada pertemuan untuk rapat koordinasi.
- Membentuk Pokja untuk di daerah masing-masing.

c. Presidium Kota Pangkalpinang

- Mengadakan sosialisasi ke daerah-daerah di Bangka melalui pemasangan spanduk-spanduk.
- Mengadakan sosialisasi melalui diskusi dengan Bapak Yuston.
- Mengusulkan Presidium Jakarta sebagai pusat kegiatan.

d. Presidium Kabupaten Belitung

- Dalam rangka memaniakkan Provinsi Bangka Belitung, di Kabupaten Belitung telah dilakukan sosialisasi melalui unsur pemuda dan acara wawancara interaktif melalui radio yang diatur setiap minggu.
- Untuk sekretariat Presidium di Kabupaten Belitung yaitu: di Gedung Departemen Penerangan.
- Untuk pendanaan yaitu melalui pendanaan masyarakat

3. Rumusan Rapat Inti

Dalam rapat inti ini dihasilkan beberapa rumusan yaitu:

a. Mekanisme Kerja

Dipercayakan sebagai pusat kegiatan, dan Kota Pangkalpinang sebagai pusat administrasi artinya setiap kegiatan yang dilakukan di Jakarta, Presidium di Jakarta berkewajiban memberikan laporan ke Presidium di Pangkalpinang, dan kemudian di distribusikan ke Kabupaten Bangka dan Belitung oleh Prsidium Kota Pangkalpinang. Presidium daerah berhak untuk melaksanakan kegiatan di daerahnya dengan otonomi kerja masing-masing.

b. Kesekretariatan

Untuk sekretariat, tetap berada di masing-masing daerah dan sebagai pusat koordinasinya ada di Kota Pangkalpinang.

c. Pendanaan

Masalah pendanaan, masing-masing daerah mencari sendiri-sendiri, tetapi digunakan secara bersama untuk kepentingan pembentukan perjuangan Provinsi Bangka Belitung. Bantuan pendanaan untuk Presidium di Jakarta dari Presidium di ketiga daerah, harus mengajukan proposal kebutuhan anggaran dana kepada Presidium di Kota Pangkalpinang, dan akan dikoordinasikan ke Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung oleh Presidium Pangkalpinang.

Pada tanggal 11 Maret 2000 Presidium Perjuangan Provinsi Bangka Belitung mengadakan pertemuan di Jakarta dan menghasilkan:

1. Perjuangan Pembentukan Provinsi Bangka Belitung sudah memasuki tahap yang sangat menentukan. Rapat telah sepakat bahwa akan ditempuh dua cara pendekatan yang dilakukan secara simultan dan horizontal yaitu:
 - a. Melalui usulan inisiatif DPR dengan pengajuan RUU tentang Pembentukan Provinsi Bangka Belitung sekaligus dengan pemekaran wilayah Kabupaten Bangka menjadi Kabupaten Bangka Utara dan Bangka Selatan serta pemekaran Kabupaten Belitung menjadi Kabupaten Belitung Barat dan Belitung Timur.
 - b. Melalui jalur eksekutif, yaitu pengajuan RUU oleh pihak Pemerintah Pusat.
2. Untuk kegiatan melalui usulan inisiatif DPR (point I.a), maka kegiatan yang akan dilaksanakan adalah melakukan lobby yang intensif dengan kalangan anggota DPR, Fraksi DPR, anggota bamus, Pansus dan puncaknya pada rapat pleno DPR. Untuk ini kami usulkan segera dibentuk team khusus untuk menggarapnya. Team dibentuk oleh Presidium dengan memberikan wewenang khusus, terutama penggunaan dan pengeluaran dana bagi kepentingan tersebut.
3. Untuk kegaitan melalui usulan eksekutif (point I.b), maka diperlukan pendekatan secara komprehensif dengan DPRD Sumatera Selatan dan Gubernur Sumatera Selatan. Untuk ini dalam tahapan awal, maka perlu melakukan konsolidasi antara eksekutif tiga daerah (Bangka, Belitung dan Pangkalpinang) – DPRD Bangka, Belitung dan Pangkalpinang serta Presidium, yang dimotori oleh Presidium secepatnya. Konsolidasi dimaksudkan untuk menentukan sikap menyatakan dukungan atas terbentuknya Provinsi Bangka Belitung secara bersamaan dalam suatu

- acara audiensi, hearing, atau rapat dengan Gubernur maupun DPRD Sumatera Selatan.
4. Bahwa kegiatan di atas keberhasilannya sangat ditentukan oleh adanya tiga dukungan utama yaitu:
 - a. Organisasi Presidium yang solid, transparan, komunikatif dan bertanggung jawab penuh atas keberhasilan perjuangan dengan mengikutsertakan segala potensi Sumber daya manusia Bangka Belitung.
 - b. Dana
 - c. Kajian rasional dan professional atas potensi kelayakan daerah, terutama kajian ekonomi, budaya dan pengembangan wilayah.
 5. Untuk mencapai organisasi Presidium yang solid, transparan, komunikatif dan bertanggungjawab tersebut, maka langkah yang perlu dilakukan adalah:
 - a. Segera dibentuknya pusat sekretariat Presidium di Jakarta. Untuk itu secepatnya segera dicari dan dikontrak sebuah rumah permanent, dengan akses yang baik untuk pusat administrasi sekretariat dan pusat komunikasi dengan segala pihak yang diperlukan dengan fasilitas minimal telpon, fax dan computer.
 - b. Segera dibuat mekanisme kerja dan koordinasi yang jelas mengenai bidang-bidang kegiatan yang ada di organisasi Presidium, hubungan dengan pengurus Presidium yang ada di daerah baik untuk informasi kegiatan maupun pelaksanaan program kegiatan ditingkat daerah
 - c. Segera dibuat mekanisme yang jelas mengenai pencarian sumber dana, pengeluaran dana dan pelaporan penggunaan dana perjuangan tersebut. Untuk itu maka pada awal sudah harus segera dibuka rekening induk Presidium yang menampung kepentingan dana tersebut dan *system* pengeluarannya. Diusulkan rekening dibuka pada tiga Bank yaitu BCA, BNI dan Mandiri.
 6. Untuk mencari dana, maka bidang pendanaan Presidium segera melaksanakan tugasnya. Dana yang perlu diusahakan oleh bidang pendanaan adalah dana yang berkaitan dengan sumbangan masyarakat, sedangkan dana yang berasal dari Pemerintah Daerah (APBD) diusahakan pengeluarannya melalui pengurus presidium inti, namun tetap harus masuk rekening induk Presidium. Untuk inti perlu adanya mekanisme yang jelas agar dihindarinya permintaan dana yang tumpang tindih dan tidak teradministrasi dengan baik. Berkaitan

dengan kegiatan pencarian dana oleh bidang pendanaan diusulkan beberapa kegiatan untuk dilaksanakan:

- a. Mengingat pengurus Presidium berjumlah hampir 215 orang, maka diharap setiap anggota pengurus minimal dapat menyisihkan dana perjuangan sebesar Rp. 100.000,- sebagai dana awal bagi kegiatan organisasi/kesekretariatan Presidium.
 - b. Coffe morning, dengan mengundang para tokoh daerah, usahawan daerah dan potensial participants
 - c. Membuat stiker mengenai perjuangan Provinsi Bangka Belitung dan diedarkan ke masyarakat di daerah (modal diperkirakan Rp. 1.000/lembar) dan diedarkan sebesar Rp. 2.500/lembar atau pembuatan kaos perjuangan. Dengan demikian akan juga berarti mensosialisasikan kegiatan perjuangan tersebut ke rakyat banyak.
 - d. Mobilisasi pengusaha di daerah dengan kegiatan seperti point 6.b maupun melalui pendekatan khusus, namun transparan
 - e. Kegiatan pelepasan, seminar ataupun pelaksanaan kegiatan lain yang dapat menciptakan sumber dana
 - f. Mengkomunikasikan nomor rekening induk ke masyarakat guna menampung kesediaan masyarakat yang tidak terikat dalam kegiatan diatas lainnya bagi menyumbangkan dana untuk perjuangan
7. Untuk penyiapan kajian rasional dan professional atas potensi pengembangan Bangka Belitung menjadi Provinsi, maka titik berat diarahkan pada:
- a. Potensi pengembangan ekonomi daerah yang bermuara kepada politik, sosial, budaya, ekonomi, pengembangan wilayah kemampuan daerah untuk mendanai kegiatan pembangunannya dengan kekuatan sendiri. Dengan ini maka focus adalah penggalian potensi PAD
 - b. Potensi pemekaran wilayah, yang menyangkut kesiapan wilayah untuk dimekarkan baik administrasi pemerintahan maupun ppotensi pengembangan lanjutannya
 - c. Daya dukung sosial budaya yang ditujukan pada pemberdayaan masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerahnya sendiri.

Untuk mencapai hal tersebut maka langkah teknis untuk percepatan kajian ini adalah pelaksanaan seminar mengenai potensi daerah tersebut pada tanggal 12 Maret 2000 di Hotel Ria Adiani- Cibogo Bogor. Setelah seminar segera dibentuk suatu panitia perumus yang minimal terdiri tiga bagian yaitu kajian ekonomi, pemekaran wilayah dan sosial budaya. Hasil dari panitia perumus ini akan diseminarkan lagi intern seluruh anggota Presidium dan setelah dirumuskan kembali akan menjadi dokumen bagi pegangan kegiatan untuk lobbie dengan pihak yang berkepentingan, Pemerintah (Pusat maupun Daerah) maupun bagi tim *fact finding* yang akan berkunjung ke daerah.

Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Pada tanggal 13 Maret 2000 DPRD Sumatera Selatan melalui surat No. 03 tahun 2000 tentang Rekomendasi Perjuangan Pembentukan Provinsi Bangka Belitung dengan ditandatangani Ketua DPRD Sumatera Selatan Adjis Saip, Wakil Ketua M. Natsir Djakfar, Drs. H. Zamzani Achmad, Sonny Poerwono, dan Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan Drs. Zainuddin Ar, Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar Drs. Arifin Paia, Ketua Fraksi Pembaharuan Drs. H. A. Gaffar Guim, Wakil Ketua Fraksi TNI/Polri Kol. NF. H.I.S Amir Putra, Ketua Fraksi Gabungan Aminuddin Ayub, Ketua Fraksi Reformasi Drs. H. Jahari

Menyikapi hasil pertemuan dengan Presidium Perjuangan Bangka Belitung tanggal 17 Februari 2000 dan sesuai hasil rapat Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan bersama dengan ketua-ketua Fraksi DPRD dan Ketua-ketua Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 17 Februari 2000, dengan ini DPRD Provinsi Sumatera Selatan menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima dan menyambut baik aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat Bangka Belitung melalui Presidium Perjuangan Pembentukan Provinsi Bangka Belitung dihadapan Pimpinan DPRD dan Ketua-ketua Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
2. Terhadap hal-hal yang menyangkut teknis dan proses lebih lanjut agar dapat diselesaikan secara proporsional dan berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Rekomendasi ini disampaikan kepada instansi dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Menetapkan hasil keputusan rapat pleno Presidium, pada tanggal 11 Maret 2000 di Jakarta, maka pada tanggal 14 maret 2000 Presidium Perjuangan Provinsi Bangka Belitung membentuk Pokja dengan nama Kelompok Kerja Program dan Pengkajian Strategis. Dengan koordinator Drs. Achmad Rusdi, ketua pelaksana Ir. Sutejo Suyitno, wakil ketua pelaksana Ir. H.

Azhar Romli, sekretaris H. Husaini SH, dengan anggota, Ir. Zulkarnaen Syamsudin, MM, Drs. Ridwan Abuhanifah MBA, Emron Pangkapi, Drs. Soeradi Suhud, Ir. Hardi Afriansyah Msi.

Pokja ini bertugas mempersiapkan *feasibility* studi potensi Bangka Belitung juga dikhususkan melobi Departemen Dalam Negeri. Hasil kerja pokja ini adalah sebuah naskah kajian akademis berupa buku proposal yang berjudul Provinsi Bangka Belitung, Jembatan Kesejahteraan Rakyat, juga sebuah buku, *Executive Summary*.

Tanggal 14 Maret 2000 Presidium Pembentukan Provinsi Bangka Belitung mengadakan pertemuan dengan komisi II DPR RI. Pada pertemuan untuk ketiga kalinya ini dihadiri Imam Sanjaya dari Fraksi PKB (Pimpinan Rapat), Teras Narang, Prof. Manasimoto, Panda Nababan, Hanjoyo P.SH, Marsiman Lande, Idras (Fraksi Golkar), Raja Rusli (Fraksi Reformasi), dan Saiful Roman (Fraksi PPP).

Dari hasil pertemuan atau dengar pendapat ini, pada dasarnya semua anggota dewan menyetujui dan menerima dengan baik niat masyarakat Bangka Belitung untuk menjadikan Bangka Belitung menjadi sebuah Provinsi.

Menurut Teras Narang, pembentukan Provinsi merupakan pengejawantahan dari UU No. 22 tahun 1999. Sedangkan Prof. Manasimoto berharap agar lingkungan hidup dapat melakukan persiapan-persiapan fisik selain dari SDA masih banyak komoditas dari darat dan laut dapat untuk digali, serta kesiapan Sumber Daya Manusia untuk mengelolanya. Dan, Idras menjelaskan untuk menjadikan suatu daerah menjadi Provinsi ada tiga aspek, yakni:

1. Aspek keinginan/aspirasi

Keinginan pembentukan Provinsi ini, haruslah benar-benar dari keinginan/aspirasi masyarakat dari arus bawah.

2. Aspek Teknik

Sejauhmana kesiapan dari calon provinsi baru ini baik dari SDA, SDM maupun secara ekonomi dan tuangkan dalam bentuk proposal yang isinya mengenai studi kelayakan sampai Renstra Provinsi Bangka Belitung di masa depan.

3. Aspek legalitas formal melalui prosudural yang resmi.

Pada tanggal 17 Maret 2000, DPRD Sumatera Selatan mengeluarkan rekomendasi persetujuan dan dukungan terhadap terwujudnya Provinsi Bangka Belitung yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dan telah disampaikan kepada DPR RI. Dan, seluruh fraksi-fraksi dalam DPRD Provinsi Sumatera Selatan pun sangat mendukung aspirasi masyarakat Bangka

Belitung.

Tanggal 21 Maret 2000 Presidium Pembentukan Provinsi Bangka Belitung mengadakan pertemuan dengan Fraksi Golongan Karya DPR RI di lantai 12 DPR RI Senayan. Dalam rapat tersebut dihadiri oleh dua orang anggota Dewan dari Fraksi Golkar yaitu Yahya Zaini dan Mohmmad Hatta.

Dalam pandangan umum dinyatakan bahwa Fraksi Golkar membentuk Tim Khusus untuk melakukan suatu kajian, apakah tetap layak halnya hanya dengan 226 Provinsi Negara Indonesia ini. Selain itu dinyatakan juga bahwa tujuan terbentuknya Provinsi adalah untuk mensejahterakan masyarakat dari SDA dan SDM, sehingga sebagai data/bahan pendukung perlunya dipenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan. Sehingga untuk Bangka Belitung ini perlu pengkajian terhadap potensi SDA maupun SDM tersebut, terutama untuk pemekaran daerah.

Tetapi pada prinsipnya Fraksi Golkar dari Komisi II tetap mendukung sepenuhnya niat masyarakat Bangka Belitung untuk menjadi provinsi. Dan dalam kesempatan tersebut Yahya Zaini mengemukakan ada empat masalah atau soal strategis, yaitu:

1. Soal kontradiktif antar masyarakat dan fraksi
2. Soal pernyataan dari Gubernur dan DPRD Sumatera Selatan
3. Belum adanya kriteria khusus untuk pemekaran wilayah/daerah
4. dari 10 Gubernur yang ada, semuanya tidak pernah menampilkan desa-desa yang ada di daerah.

Menurut Yahya Zaini, jalan yang terbaik adalah melalui strategi pemerintah, bukan usul Inisiatif Dewan. Sementara sambil menunggu surat keterangan dari Gubernur Sumatera Selatan, Tim Pembentukan Provinsi Bangka Belitung melakukan lobi-lobi kepada anggota DPR RI, khususnya dari komisi II. Selanjutnya, fraksi PDKB, Fraksi PDI-P, Fraksi partai Golkar, Fraksi Reformasi, dan Fraksi PPP, memanggil presidium untuk didengar keterangan dan penjelasan tentang sasaran dan tujuan serta kajian pembentukan Provinsi Bangka Belitung yang disampaikan melalui usul Inisiatif DPR RI.

Pada tanggal 26 Maret 2000, Presidium mengadakan pertemuan pleno lengkap di Hotel Partai Indah Sungailiat yang dihadiri seluruh pengurus inti, sesepuh dan penasehat, serta tokoh masyarakat dari ketiga daerah, Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, juga masyarakat perantauan di Jakarta. Serta dihadiri oleh Bupati dan Walikota dari ketiga daerah.

Dalam pertemuan tersebut dipaparkan proposal oleh Tim Konsultan

BPK DR. Ir. Ismed Abidin. Sedang para nara sumber adalah H. Muhammad Muas, SH, Drs. Soeradi Suhud, Msi, serta Emron Pangkapi. Dalam pertemuan tersebut telah disepakati persiapan untuk pengaturan dana perjuangan dibantu oleh pemerintah ketiga daerah.

Dari pertemuan rapat pleno Presidium Perjuangan Provinsi Bangka Belitung tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Untuk rapat pertemuan berikutnya, Belitung sebagai tuan rumah (waktu dan tempat ditentukan dikemudian hari).
2. Sosialisasi oleh Bupati/Walikota dengan memanggil/melalui Camat, Lurah, Kades dan LKMD. Selain itu juga dalam rangka sosialisasi ini dapat melalui:
 - KNPI (dengan menggerakkan pemuda/generasi muda), melalui ulama-ulama, Melalui Pegawai Negeri Sipil/Kopri, melalui sarasehan/pertemuanakbar
3. Bahan-bahan sosialisasi dalam bentuk modul dan spanduk
4. Pendanaan
 - Komitmen dana dari tiga daerah melalui APBD
 - Panggilan dana dari sumber-sumber yang sah lainnya (dari PT. Timah dan BUMN lainnya serta perusahaan-perusahaan swasta di daerah).

Pada tanggal 17 April 2000, Walikota Kota Pangkalpinang Drs. H. Sofyan Rebutin, Bupati Bangka Ir. H. Eko Maulana Ali, M.Sc, Bupati Belitung Ishak Zainuddin, Ketua DPRD Kota Pangkalpinang Badaruddin Usman, Ketua DPRD Kabupaten Bangka Riswan Hayadin, Ketua DPRD Kabupaten Belitung H. Anwar DM mengeluarkan Surat Pernyataan Bersama Tentang Kesiapan Untuk Membangun Provinsi Bangka Belitung Yang Akan Terwujud.

- DPRD ketiga daerah Kepulauan Bangka Belitung dan DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tersebut di atas, merupakan aspirasi murni masyarakat yang tumbuh berkembang sejak tahun 1956 yang perlu segera diwujudkan dalam era reformasi saat ini.
- Pemerintah Daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) bersama...komponen bangsa di ketiga daerah kepulauan Bangka Belitung, telah siap melaksanakan tugas pembangunan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
- Mendukung tekad seluruh masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung, untuk menciptakan dan memelihara kondisi yang kondusif dalam menyongsong terbentuknya Provinsi Bangka Belitung yang

didambakan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung.

- Mendukung kebijakan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan untuk segera menerbitkan rekomendasi/persetujuan Gubernur terhadap Keputusan DPRD Kota Pangkalpinang, DPRD Kabupaten Bangka, Keputusan DPRD Kabupaten Belitung dan Keputusan DPRD Sumatera Selatan.
- Pernyataan bersama ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran serta tanggung jawab untuk melaksanakan aspirasi masyarakat Kepulauan Bangka Belitung. Pernyataan Bersama ini disampaikan dengan hormat kepada Ketua DPR-RI di Jakarta, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Otonomi, Menteri Hukum dan Perundang-Undangan, Pimpinan Komisi II DPR RI, Gubernur Sumatera Selatan, Pimpinan DPRD Sumatera Selatan.

Pada tanggal 9 April 2000, di Gedung DPRD Kabupaten Belitung, Presidium mengadakan pertemuan atau rapat pleno lanjutan yang diperluas setelah rapat sebelumnya di Hotel Partai Indah Sungailiat Bangka pada tanggal 26 Maret 2000. Rapat dihadiri sekitar 200 orang dari seluruh pengurus inti, tokoh masyarakat Bangka Belitung, kepala daerah dan DPRD.

Dalam rapat tersebut dipaparkan proposal Provinsi, pemantapan tugas. Selanjutnya, telah dibuatkan surat tugas dan tim untuk membantu dan mempersiapkan kedatangan Tim *Fact Finding* dan DPOD DPR RI serta Depdagri. Dan, dalam kesempatan tersebut Bupati Belitung menyatakan mendukung secara resmi dan terbuka.

Selanjutnya, pada tanggal 20 April 2000 di Hotel Kartika Chandra Jakarta dilaksanakan pertemuan khusus Pimpinan Daerah Bangka, Belitung, dan Pangkalpinang, beserta pimpinan inti Presidium Pembentukan Provinsi Bangka Belitung. Acara dihadiri oleh Bupati Bangka Ir. H. Eko Maulana Ali M.Sc, Bupati Belitung Ishak Zainiddin B.Sc, dan Walikota Pangkalpinang Drs. Sofyan Rebuin. Pertemuan menyepakati untuk membuat kesepakatan mendukung sepenuhnya perjuangan terwujudnya Provinsi Bangka Belitung.

Pada tanggal 23 April 2000, tumpah ruah masyarakat dari berbagai penjuru Pulau Bangka dan Belitung memadati Lapangan Merdeka Pangkalpinang. Masyarakat antusias dalam mendukung terbentuknya Provinsi Bangka Belitung dan diperkirakan puluhan ribu orang yang datang saat itu untuk melakukan apel bersama. Dan, hal ini menandai bahwa keinginan terbentuknya Provinsi bukanlah semata keinginan sekelompok elite semata. Dalam kesempatan tersebut juga dibacakan pernyataan tertulis oleh ketiga Pimpinan Daerah, yaitu Bupati dan Walikota serta ketiga Pimpinan DPRD

Kota Pangkalpinang, Bangka serta Belitung. Intinya mendukung terbentuknya Provinsi Bangka Belitung.

Pada tanggal 7 sampai dengan 9 Mei 2000, Anggota DPR mengadakan kunjungan ke Bangka Belitung. Tanggal 7 Mei 2000 Anggota DPR mengadakan pertemuan dengan Muspida Kabupaten Belitung, Anggota DPRD Kabupaten Belitung, Pimpinan Partai Politik, Ormas, LSM, Tokoh Masyarakat, Jajaran Pemda Kabupaten Belitung, Camat, Lurah dan Pengusaha. Dilanjutkan peninjauan ke Kota Tanjungpandan, Belitung Timur (Manggar), Belitung Selatan (Mambalong).

Selanjutnya, tanggal 8 Mei 2000 Anggota DPR mengadakan pertemuan dengan Muspida Kabupaten Bangka, Anggota DPRD Kabupaten Bangka, Pimpinan Partai Politik, Ormas, LSM, Tokoh Masyarakat, Jajaran Pemda Kabupaten Bangka, Camat, Lurah dan Pengusaha. Dilanjutkan ke Bangka Selatan (Koba dan Toboali), Bangka Barat (Mentok), Bangka Utara (Belinyu).

Tanggal 9 Mei 2000 Anggota DPR bertemu dengan Muspida Kota Pangkalpinang, Anggota DPRD Kota Pangkalpinang, Pimpinan Partai Politik, Ormas, LSM, Tokoh Masyarakat, Jajaran Pemerintah Kota Pangkalpinang, Camat, Lurah dan Pengusaha. Kemudian, dilanjutkan peninjauan ke Kota Pangkalpinang.

Di sela kunjungan Anggota DPR RI ke Bangka Belitung yaitu pada tanggal 7 sampai 9 Mei 2000. Pada tanggal 7 Mei 2000 di halaman Gedung Nasional Tanjungpandan dengan massa sekitar 20.000 orang diadakan pula rapat akbar oleh masyarakat Belitung untuk mendukung terbentuknya Provinsi Bangka Belitung. Sedangkan pada tanggal yang sama masyarakat Kota Manggar (kini Kabupaten Belitung Timur) juga berlangsung apel akbar yang dihadiri massa sebanyak 5.000 orang. Keesokan harinya tanggal 8 Mei 2000, rapat akbar diadakan di Kota Sungailiat Kabupaten Bangka.

Pada tanggal 12 Juni 2000, merupakan langkah akhir DPR RI mengadakan rapat Paripurna untuk membahas tentang Pembentukan Provinsi Bangka Belitung. Sebulan kemudian, yaitu pada tanggal 10 Juli 2000, Gubernur Sumatera Selatan mengeluarkan surat bernomor: 125/1357/II/2000 dan dikirimkan ke Menteri Dalam Negeri. Dan, pada tanggal yang sama Presidium melalui surat No. 044/Press BB/Jkt/VII/2000 perihal undangan juga melayangkan surat kepada Dirjen Pemda Departemen Dalam Negeri. Isi undangan tersebut yaitu dalam rangka proses penyelesaian administratif pembentukan Provinsi Bangka Belitung.

Pada tanggal 10 Juli 2000, Presidium melalui surat No. 045/Pres-BB/JKt/VII/2000 juga melayangkan surat kepada Walikota Pangkalpinang,

Bupati Bangka dan Bupati Belitung perihal Kunjungan Dirjen Pemuda. Isi surat tersebut yaitu dalam rangka tim DPOD mempersiapkan kajian teknis kelayakan Pembentukan Provinsi Bangka Belitung, maka terlebih dahulu Dirjen Pemuda beserta staf akan berkunjung ke Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka dan apabila memungkinkan juga ke Kabupaten Belitung pada hari Sabtu, 15 Juli 2000, dengan acara antara lain:

- Silaturahmi dan dialog dengan para Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, termasuk Pimpinan Parpol serta tokoh dan pemuka masyarakat
- Kunjungan ke lembaga-lembaga pendidikan, dan potensi ekonomi maupun public utility

4.1.6 Membentuk Pansus RUU Provinsi Bangka Belitung

Pada tanggal 20 Juli 2000, DPR RI mengadakan Sidang Pertama untuk membentuk Pansus RUU Provinsi Bangka Belitung yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sutarjo Suryoguritno. Dalam sidang tersebut diputuskan RUU (Rancangan Undang-Undang) Provinsi Bangka Belitung, dan terpilih sebagai ketua Pansus adalah Panda Nababan dari Fraksi PDI Perjuangan.

Dalam sidang tersebut dihadiri sebanyak 32 dari 50 orang anggota Pansus, sidang ini sempat molor selama dua jam dari jadwal yang telah ditentukan yaitu seharusnya pukul 14.00 wib menjadi pukul 16.00 wib. Namun rapat Pansus berjalan mulus, dan menyepakati rapat-rapat kerja pembahasan RUU Provinsi Bangka Belitung pada masa Persidangan Pertama tahun 2000-2001 yang dimulai pada 16 Agustus 2000.

Sedangkan persiapan teknis, termasuk peninjauan lapangan dapat dilakukan oleh Pansus pada masa reses DPR RI yang berlangsung dari tanggal 24 Juli sampai 15 Agustus 2000.

Pada tanggal 24 Agustus 2000 DPR RI menyampaikan surat dengan No. PW.001/3624/DPR-RI/2000 ke Gubernur Sumatera Selatan tentang Rencana Kunjungan Pansus DPR RI ke Sumatera Selatan pada tanggal 25 sampai 28 Agustus 2000 khususnya ke Bangka, Pangkalpinang, dan Belitung.

Tanggal 1 September 2000 Tim Pansus DPR RI mengadakan pertemuan dengan Gubernur Sumatera Selatan. Dan, pada hari itu juga Gubernur Sumatera Selatan mengirimkan surat bernomor: 125/4666.II/2000 kepada Menteri Dalam Negeri.

Pada bulan Oktober 2000, masyarakat Bangka Belitung mendapat berita bahwa Provinsi Bangka Belitung akan disahkan oleh DPR RI pada tanggal 24 Oktober. Dan pada tanggal 22 Oktober Bupati Bangka Ir. H. Eko

Maulana Ali mengirimkan masyarakat Bangka sebanyak 980 orang dari Pelabuhan Tanjung Gudang Belinyu untuk berangkat ke Jakarta dengan menggunakan Kapal KRI Teluk Cirebon milik TNI AL.

Keberangkatan ini dipimpin oleh Kurnia Ishak Lazim yang setibanya di Dermaga Tanjung Priok langsung diadakan apel yang dipimpin oleh Ir. H. Eko Maulana Ali. Sedangkan, untuk persiapan kegiatan selama di Jakarta yang sasarannya adalah ke Gedung DPR RI Senayan.

Show of force yang dilakukan masyarakat Bangka Belitung di DPR RI telah membuka mata banyak orang bahwa keinginan untuk menjadikan wilayahnya sebuah provinsi bukan lagi menjadi rintangan siapapun, seperti hambatan yang terjadi pada perjuangan generasi terdahulu (generasi tahun 1956 dan 1966-1970). Kekuatan riil masyarakat tak bisa terbendung.

Aplikasi emosional masyarakat Bangka Belitung telah pula menyatukan mereka yang tersebar dari berbagai kota di Pulau Jawa untuk membantu dan menyatu dengan saudara-saudara mereka yang datang dari daerah. Sumbangan logistik mengalir dengan deras tanpa pamrih untuk aktivitas selama unjuk kekuatan massa di Gedung DPR RI. Dan, tidak ketinggalan kesenian Barongsai memberi warna perjuangan di halaman DPR RI.

Pada tanggal 28 Oktober 2000 rencana ketuk palu pengesahan terbentuknya Provinsi Bangka Belitung gagal dikarenakan belum adanya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Persetujuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan, selanjutnya pada tanggal 7 Nopember 2000 Presidium mengadakan rapat terbatas di lantai II Gedung Graha Mustika Ratu Jakarta. Rapat tersebut membahas persiapan acara kunjungan Tim Fact Finding DPR RI dan Tim DPOD Depdagri pada tanggal 14 Nopember 2000 ke Bangka Belitung. Dan, rapat ini selanjutnya diteruskan lagi ke Pemda Belitung pada tanggal 9 Nopember 2000.

4.2 Terbentuknya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Setelah melalui perjuangan yang cukup panjang kurang lebih 44 tahun, akhirnya keinginan rakyat Bangka Belitung untuk membentuk Provinsi sendiri terlepas dari Propinsi Sumatera Selatan terwujud juga.

Pada tanggal 21 Nopember 2000 tumpah ruah masyarakat Bangka Belitung memenuhi halaman parkir hingga ruang Nusantara V Gedung DPR RI Senayan Jakarta, mereka menunggu saat ketuk palu tanda pengesahan terbentuknya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mereka tidak saja datang dari daerah, tapi dari berbagai kota di Pulau Jawa. Mereka sudah hadir di sana sejak pagi hari.

Saat 44 tahun menunggu “Kemerdekaan” untuk lepas dari Sumatera Selatan mulai nampak dihadapan mereka. Ribuan orang berjubel dengan berbagai akibat, terlihat ada yang membawa spanduk dengan berbagai tulisan yang mendukung segera terbentuknya Provinsi. Atraksi kesenian Barongsaipun membahana tak henti-hentinya, dan sukacitapun semakin bertambah dengan hadirnya penari campak, gemerincing suara kesenian hadrah.

Gema ucapan Allahu Akbar beberapa kali terdengar, setelah beberapa detik Pimpinan Sidang Paripurna DPR RI Sutarjo Suryogiritno mengetukkan palu tanda pengesahan RUU Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan, sekitar pukul 11.37 Wib seruan kebesaran nama Tuhan itu menggema di depan ruangan sidang Nusantara V.

Rancangan Undang-Undang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi Undang-Undang dengan No. 27 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (lembaran Negara RI tahun 2002 Nomor: 217; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033). Dengan adanya Undang-Undang ini, resmilah Kepulauan Bangka Belitung menjadi Provisnsi ke- 31 di Indonesia dengan ibukotanya Pangkalpinang. Sebagai pelaksana tugas dan caretaker Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditunjuklah Amur Muhasyim oleh Pemerintah Pusat.

Undang-undang RI No. 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertanggal 4 Desember 2000 ditandatangani Presiden RI Abdurrahman Wahid dan diundangkan oleh Sekretaris Negara Djohan Effendi. Isinya antara lain :

- Berhubung dengan perkembangan dan kemajuan Provinsi Sumatera Selatan, khususnya Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, dan Kota Pangkalpinang serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa yang akan datang.
- Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lainnya di Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, dan Kota Pangkalpinang serta meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Provinsi Sumatera Selatan, perlu dibentuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 27 tahun 2000. Maka babak baru perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimulai. Langkah awal ini menandai bahwa perjuangan takkan mungkin surut ke belakang tetapi terus maju ke depan, mengisinya hingga menjadi lebih berarti dengan segala harapan yang cemerlang.

Pada akhir 2001, terbentuk pula DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diketuai oleh Emron Pangkapi. Bulan Pebruari 2002 DPRD Bangka Belitung memilih Drs. Hudarni sebagai Gubernur pertama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Foto 4. Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sebagai Ibukota Propinsi ditetapkan di Pangkalpinang yang terletak di Kepulauan Bangka Belitung. Kini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki 6 Kabupaten dan 1 Kota, dengan jumlah penduduk 932.137 jiwa yang terdiri atas berbagai etnis di Indonesia termasuk keturunan Cina. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah terbentuk, akan terus giat melaksanakan pembangunan di segala bidang untuk segera mungkin meningkatkan kemakmuran rakyatnya.

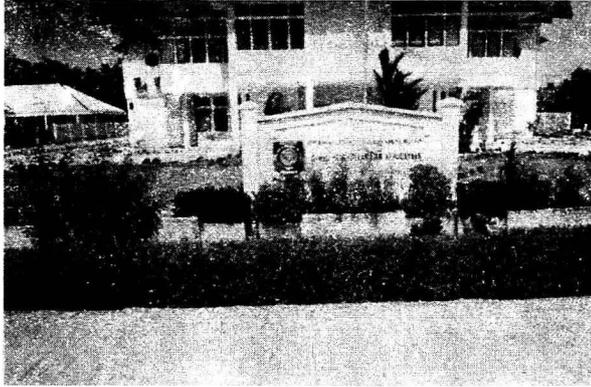
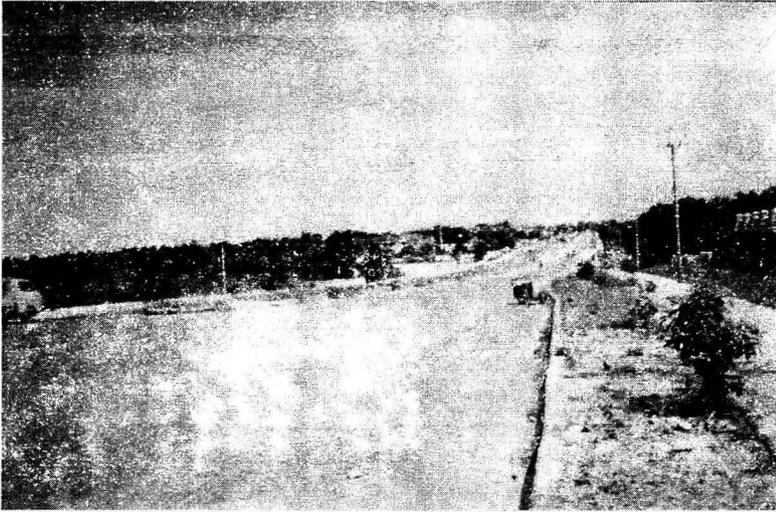


Foto. 5 Pusat Perkantoran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Wilayah Kecamatan Bukit Intan

Kabupaten/kota yang dimiliki Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah: Kabupaten Belitung Barat, Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Bangka Induk, Kabuapten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, dan Kota Pangalpinang dengan luas wilayah keseluruhan 81.725.14 km², terdiri dari luas daratan 16.424.14 km² dan luas perairan 65.301 km² yang memiliki 254 pulau-pulau kecil.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kini telah terbentuk, untuk mewujudkan apa yang diperjuangkan selama ini, yaitu mengisi pembangunan dan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah tugas seluruh elemen masyarakat dan pemerintah di daerah ini.



**Foto 6. Jalan Menuju Pusat Perkantoran Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung**

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kepulauan Bangka Belitung sebelum menjadi Provinsi, adalah suatu wilayah yang tergabung dalam Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 1933 Bangka Belitung berstatus Keresidenan dan merupakan negara bagian pada masa RIS. Bangka Belitung juga tercatat sebagai negara bagian yang bergabung pertama kali untuk kembali di pangkuan Negara Republik Indonesia.

Pada tahun 1956, Bangka Belitung ditetapkan kembali menjadi wilayah keresidenan dalam Propinsi Sumatera Selatan, sama halnya dengan Lampung dan Bengkulu. Kedua daerah ini merupakan daerah keresidenan yang sudah jauh lebih maju, sehingga menjadi terpisah dari Sumatera Selatan.

Selanjutnya, pada masa penjajahan Belanda daerah ini juga ditetapkan sebagai keresidenan. Pada masa itu, almarhum Bung Hatta mengharapkan Bangka Belitung ditingkatkan statusnya menjadi daerah khusus yang dikenal BB berhimpun dalam BABIRI (Bangka, Belitung, dan Riau) tetapi belum berhasil. Kemudian dengan berlakunya Perpu Nomor 3/1956 menghapuskan status Keresidenan, dan berlakunya UU Darurat Nomor 4 Tahun 1956, maka status Bangka Belitung menjadi Kabupaten.

Sejak tahun 1956, sebagai respon atas UU Darurat Nomor 4 Tahun 1956, rakyat Bangka Belitung mulai menuntut pembentukan suatu Provinsi Bangka Belitung. Mulanya daerah eks Keresidenan lain disamping Bangka Belitung (seperti Lampung, Jambi, dan Bengkulu) masuk ke Sumatera Selatan . Kemudian secara berturut-turut Jambi dilepaskan melalui UU Nomor 8 tahun 1967, dan Bengkulu dilepas pula melalui UU Nomor 9 tahun 1967, dan Bengkulu dilepas pula melalui UU Nomor 9 tahun 1967, menjadi Provinsi baru. Namun Bangka Belitung tidak dilepaskan dan tetap menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk mewujudkan keinginan rakyat Bangka Belitung menjadi Provinsi sendiri, terlepas dari Provinsi Sumatera Selatan, maka pada tahun 1956 rakyat Bangka Belitung berjuang dengan segala kemampuan yang mereka miliki, tetapi belum berhasil. Selanjutnya, perjuangan masyarakat Bangka Belitung dilanjutkan lagi pada tahun 1970, namun kembali kandas. Kemudian, harapan dan impian Bangka Belitung menjadi Provinsi terwujud setelah reformasi, dan Pada tanggal 21 Nopember 2000 Kepulauan Bangka Belitung resmi menjadi Provinsi yang merupakan Provinsi ke- 31 di Indonesia

dengan ibukota Pangkalpinang. Sebagai pelaksana tugas dan caretaker Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ditunjuk Amur Muhasyim oleh Pemerintah pusat.

Pada akhir 2001, terbentuk pula DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diketuai oleh Emron Pangkapi. Bulan Februari 2002 DPRD Bangka Belitung memilih Drs. Hudarni sebagai Gubernur pertama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

5.2 Saran

Kepulauan Bangka Belitung yang telah resmi menjadi Provinsi pada tanggal 21 Nopember 2001 disarankan;

1. Agar Pemerintah Daerah lebih meningkatkan pembangunan dan lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat di daerah ini.
2. Pemerintah Daerah lebih memperhatikan mutu pendidikan di daerah ini, dengan menambah sekolah yang ada juga meningkatkan mutu guru dengan memberikan kesejahteraan yang memadai agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik.
3. Mengingat pentingnya peranan Kepulauan Bangka Belitung dalam setiap proses perjalanan sejarah dan di dukung oleh banyaknya peninggalan sejarah yang ada, maka Provinsi ini dapat dijadikan salah satu obyek wisata sejarah.
4. Potensi sumber daya alam yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu lebih dikembangkan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Husnial Husin. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan RI di Bangka Belitung*. Jakarta. PT. Karya Unipress. 1983.
- Abdullah, Taufik dan Abdurrachman Surjomihardjo. *Ilmu Sejarah dan Historiografi: Arab dan Perpektif*. Jakarta. PT. Gramedia. 1985.
- Abdullah, Taufik, *Sejarah dan Masyarakat: Lintasan Historis Islam di Indonesia*. Jakarta. Pustaka Firdaus. 1987
- Bangka Belitung Perpaduan Keindahan Alam dan Budaya*. Direktori Pariwisata Kepulauan Bangka Belitung, t.t.
- Dikbud, *Catatan Sejarah Terbentuknya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Laporan Final. Desember 2004. PT. Marina Widya Karsa.
- Gazalba, Sidi. *Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu*. Jakarta. Bhratara. 1981.
- Gottschalk, Louis. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta. UI. Press. 1983.
- Hadi Adjin Abdullah. Drs. *Sejarah Perjuangan Rakyat Belitung (1924-1950)*.
- Irham, dkk. *Naskah Perjoangan Propvinsi Bangka Belitung*. Jakarta. Prsidium Perjuangan Provinsi Bangka Belitung. 1969.
- Ishak, Ahmad. *Kepulauan Bangka Belitung Semangat dan Pesona Propinsi Timah dan Lada*. Pemda Kabupaten Bangka. 2002.
- Kompas, *Usulan Pembentukan Propinsi Bangka Belitung Demi Kemajuan dan Kesejahteraan*. Stanford Raffkles: Antara Belitung dan Singapura. 2000.
- Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta. PT.Tiara Kencana. 1994.
- 80 *Sejarah Terbentuknya Bangka Belitung*

-----, *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta. Yayasan Benteng Budaya. 1995.

Murod, Johan. *Kilas Balik Perjuangan Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Bangka. 2001.

-----, *Bisakah Bangka Belitung Jadi Wilayah Propinsi*. Sriwijaya Pos 12 April. 1999.

Pemkab. *Selayang Pandang Kabupaten Bangka*. Bangka. 2003.

Rusdi, Ahmad et. *Propinsi Bangka Belitung Menuju Kesejahteraan Rakyat*. Presidium
Pembentukan Propinsi Bangka Belitung. Bangka. 2002.

-----, *Detik-Detik Perjuangan dan Obsesi Propinsi Teladan Kepulauan Bangka Belitung*. Bangka. 2001.

Saleh Zainuddin, H.M. *Ringkasan Sejarah Perjuangan Rakyat Bangka dan Belitung*. tt.

Sriwijaya Pos. *DPR RI Undang Gubernur Sumsel: Soal Pembentukan Babel*. 2000.

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Drs. Akhmad Elvian
Umur : 45 tahun
Pekerjaan : PNS
Alamat : Budpar Pangkalpinang

2. Nama : Drs. Eppendi
Umur : 47 tahun
Pekerjaan : PNS
Alamat : Dikbud Prov. Bangka Belitung

3. Nama : Suhaimi
Umur : 66 tahun
Pekerjaan : Pemuka Masyarakat dan Tokoh Adat Bangka Belitung
Alamat : Jln. Kejaksaan no. 24 Pangkalpinang.

4. Nama : Rosmawi Latief
Umur : 81 tahun
Pekerjaan : Pemuka Masyarakat dan Tokoh Adat Bangka Belitung
Alamat : Jln. Muntok, Kampung Medang Pangkalpinang

BIODATA



NURAINI, lahir di Pulau Laut, Kepulauan Natuna-Riau Kepulauan pada 24 Maret 1963. Menyelesaikan program Sarjana Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru tahun 1992. Bekerja sebagai peneliti Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Tanjungpinang sejak tahun 1993.



SUARMAN, lahir di Kampar, Riau pada 1 Januari 1963. Lulus Sarjana Sastra Indonesia, dari Universitas Lancang Kuning Pekanbaru tahun 1990. Sejak tahun 1991 menjadi peneliti di Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Tanjungpinang. Sekarang menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada instansi yang sama

Perpustakaan
Jenderal H

959

NI